43576.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA LAHAN DI SULAWESI BARAT

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

MASNAWI M.

NIM. 500655323

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul
"Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Tata Kelola Lahan Pertanian di Provinsi Sulawesi Barat " adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Majene, 20 Juli 2018
Yang Menyatakan

(Masnawi M.)
NIM. 500655323

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA LAHAN PERTANIAN DI SULAWESI BARAT

Masnawi M. / 500655323
masnawim@gmail.com
Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Studi tentang Implementasi Kebijakan Tata Kelola Lahan Pertanian di Sulawesi Barat merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai sebuah upaya untuk memberikan input terhadap proses pembangunan pertanian di Sulawesi Barat. Penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian tata kelola atau pengelolaan lahan yang ideal yang disarikan dari beragam teori dan praktek tata kelola lahan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Pengamatan langsung pada obyek studi sesuai dengan lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. Mengidentifikasi obyek-obyek yang ada pada lokasi penelitian meliputi ruang terbangun (*solid*), ruang tidak terbangun atau ruang terbuka (void) serta hubungan antar ruang-ruang (linkage), dengan melihat kondisi tata ruang sekarang, Setelah data lapangan dan literatur didapat sesuai fokus penelitian maka proses analisis dilakukan untuk mendapatkan kebijakan pengembangan kawasan pertanian di Sulawesi Barat.

Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Hingga kini hanya Kabupaten Mamuju yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Kualitas dan kemampuan lahan diperlukan optimasi pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan perencanaan pemanfaatan lahan secara seksama sehingga mengambil keputusan paling menguntungkan. Prinsip penentuan kemampuan lahan untuk suatu pemanfaatan pada dasarnya dilakukan dengan pertimbangan berbagai aspek diantaranya aspek fisik, untuk menghindari munculnya dampak negatif dari pemanfaatan yang tidak optimal. Perencanaan penggunaan lahan dipertukarkan dengan istilah perencanaan tata Guna lahan; karena pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. Dalam berbagai literatur, kedua istilah ini disebut land use planning. Sedikit perbedaan keduanya banya terletak pada penekanan pada ruang (space).

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan, tata kelola lahan pertanian.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT POLICIES IN AGRICULTURAL LAND GOVERNANCE IN WEST SULAWESI

Masnawi M. / 500655323
masnawim@gmail.com

Graduate Program
Open University

Agricultural land has a strategic role and function for the agrarian society of Indonesia because there are a large number of Indonesian people who depend on the agricultural sector. Therefore, the land not only has economic value, but also social, even religious value. In the context of sustainable agricultural development, land is a key resource in agriculture, especially in conditions where most areas of business are still dependent on land-based farming patterns. Land is a scarce natural resource because the amount does not increase, but the need for land always increases.

The Study on Implementation of Agricultural Land Governance Policy in West Sulawesi is a qualitative approach as an effort to provide inputs to the agricultural development process in West Sulawesi. This study focuses on an ideal governance or land management assessment derived from various theories and practices of land governance. In this research, the method used is qualitative descriptive method. Analysis is done continuously from the beginning of the study to data analysis. Direct observation on the object of study in accordance with the scope of research and theory as research support based on the scope of the discussion. Identify the objects in the research location include solid space, unvaccinated space or open space (void) and relationships between spaces (linkage), by looking at the current spatial conditions, After field data and the literature obtained in the focus research and analysis process done to get policy of development of agricultural area in West Sulawesi.

West Sulawesi consists of 6 districts, namely Mamuju Regency as the capital of the Province, Majene Regency, Polewali Mandar Regency, Mamasa Regency, Pasangkayu Regency and Mamuju Tengah Regency. Until now only Mamuju District that has not set the Spatial Plan Area. The quality and capability of the land required optimization of land use by considering the planning of land use carefully so as to make the most profitable decisions. The principle of determining the ability of land for a utilization is basically done with consideratiou of various aspects including the physical aspect, to avoid the emergence of negative impacts of unoptimal utilization. Land use planning is exchanged in terms of land use planning; because it basically has the same meaning. In various literatures, these two terms are called land use planning. A little difference between them lies in the emphasis on space.

Keywords: *Policy implementation, agricultural land governance.*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Lahan Pertanian di Sulawesi Barat
Penyusus TAPM : Masnawi M.
NIM : 500655323
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2018

Menyetujui :

Pembimbing II,

Made Yudhi Setiani, S.IP.,M.Si.,Ph.D.
NIP.197102191998022001

Pembimbing I,

Dr. Zulkarnain Umar, M.Si
NIDN. 0907076102

Penguji Ahli

Dr. Muh. Kadarisman, M.Si.
NDN. 035015902

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik

Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP.19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP

Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.
NIP.19640722 198903 1 019

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	: Masnawi M.
NIM	: 500655323
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Judul TAPM	: Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Tata Kelola Lahan di Sulawesi Barat

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal	: Minggu, 20 Mei 2018
W a k t u	: Pukul 14.30 WITA

dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji — Tandatangan

Nama : Drs. Arifin T, S.Pd, M.Pd. .....

Penguji Ahli
Nama : Dr. Muh. Kadarisman, M.Si. .....

Pembimbing I
Nama : Dr. Zulkarnain Umar, M.Si. .....

Pembimbing II
Nama : Made Yudhi Setiani, S.IP.,M.Si.,Ph.D .....

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

KATA PENGANTAR

Penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Syukur kepada Allah SWT bahwa Penyusun dapat sampai pada tahap ini. TAPM mengambil Topik Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Lahan Pertanian di Sulawesi Barat, bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalan tata kelola lahan di Sulawesi Barat dan factor-faktor yang menghambat dan menunjang implementasi kebijakan tata kelola area lahan pertanian di Sulawesi Barat.

Untuk itu dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyusun tesis ini, yaitu:

1. Prof. Ir. Tian Belawai, M.Ed.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka
2. Dr. Darmanto, M.Ed. selaku Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial dan Politik Universitas Terbuka.
3. Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum, Ilmo Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka.
4. Drs. Arifin Tahir, S.Pd.,M.Pd selaku Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Majene
5. Dr. Zulkarnain Umar, M.Si. dan Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang berkenan memberikan banyak hal dalam proses penyusunan TAPM ini.
6. Dr. Muh. Kadarisman, M.Si. selaku Penguji ahli dalam Ujian Sidang
7. Ibunda Hj. Sanah Parenta, Maya Savitri Rusli, Muhammad Rizqy,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

Muchlis Malik, Idham Malik dan Mawadda Malik untuk semua dukungan moril selama selama proses ini berlangsung.

8. Pak Safri selaku pengelola pascasarjana Universitas Terbuka UPBJJ Majene yang telah memberikan informasi kegiatan belajar di UT-UPBJJ Majene baik kegiatan belajar online maupun tutor tatap muka.
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan TAPM ini.

Akhirnya penulis berharap semoga TAPM ini bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan terutama bagi *stakeholder* yang terkait dengan pengambilan kebijakan pemanfaatan lahan di Provinsi Sulawesi Barat sebagai bahan pengkajian lebih lanjut, Terimakasih.

Penulis

Masnawi M.
NIM. 500655323

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Riwayat Hidup

Nama	: Masnawi
NIM	: 500655323
Program Studi	: Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir	: Pati'di, 29 April 1981
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Alamat Rumah	: Jl. Hapati Hasan Perumahan Bukit Karema Indah Blok B2 No. 11 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Kode POS 91511
Telpon (HP)	: 081355741018
Alamat Email	: masnawim@gmail.com
Nama Istri	: Maya Savitry Rusli
Nama Anak	: Muhammad Rizqy

Riwayat Pendidikan

Tamat SD Tahun 1992	di SDN Inpres Salupangi
Tamat SMP Tahun 1995	di SMP Negeri 1 Mamuju
Tamat SLTA Tahun 1998	di SMU Negeri 1 Mamuju
Sarjana (S1) Tahun 2002	di Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia Makassar – Sulawesi Selatan

Riwayat Pekerjaan

Pekerjaan	: PNS di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Sejak Tahun 2006
NIP.	: 197504132006041016
Pangkat Terakhir	: Penata Tk.I/III.d

Demikian Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju, 20 Juli 2018

Masnawi M.
NIM. 500655323

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
LEMBAR PERSETUJUAN v
HALAMAN PENGESAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Implementasi Kebijakan Pemerintah 7
B. Tata Kelola Lahan Pertanian 13
1. Pengertian Lahan 14
2. Pengertian Pertanian 16
3. Pembangunan Pertanian 17
C. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 27
D. Penelitian Terdahulu 44
E. Kerangka Pikir 47
E. Deskripsi Fokus Penelitian 49

BAB III. METODE PENELITIAN 53
A. Desain dan Tipe Penelitian 55
B. Jenis dan Sumber Data 56
C. Teknik Pengumpulan Data 57
D. Teknik Analisis Data 65

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 72

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

A. Deskripsi Objel Penelitian .....

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Lahan Pertanian di Sulawesi Barat 80

1. Tata Ruang Wilayah Kabupaten 89

D. Faktor Penghambat dan Penunjang dalam Tata Kelola Lahan Pertanian 92

1. Faktor Penghambat 92

2. Faktor Pendukung 95

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 101

A. Kesimpulan 101

B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

DAFTAR TABEL

Nomor : Teks : Halaman:

1. Luas Wilayah dan Pembagian Alokasi (Pemanfaatan Wilayah Ruang) 80

2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Sulawesi Barat 87

3. Daftar Perda RTRW Kabupaten se Sulawesi Barat 89

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

DAFTAR GAMBAR

1. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat 74
2. Peta Administrasi Kabupaten Mamuju Tengah 76
3. Peta Administrasi Kabupaten Majene 77
4. Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar 77
5. Peta Administrasi Kabupaten Mamuju Utara 78
6. Peta Administrasi Kabupaten Mamasa 79
7. Peta Administrasi Kabupaten Mamuju 79
8. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 82

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji. Otonomi acap kali menjadi bahan perbincangan baik di kalangan birokrat, politisi, cendekiawan maupun kalangan masyarakat umum. Perbincangan semakin hangat setelah di keluarkannya paket perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi dikenal selama ini sebagai otoritas khusus masing-masing daerah dalam tata kelola pemerintahan, tata kelola pemerintahan mencakup semua hal di daerah dan menjadi modal dalam upaya menciptakan kesejahteraan. Termasuk yang diatur didalamnya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian menempati posisi strategis dalam pembangunan pertanian. Kontribusi pertanian terhadap pembangunan pertanian terus meningkat seperti tercermin pada beberapa indikator pertumbuhan, diantaranya Produk Domestik Bruto (PDB), volume ekspor pertanian, penyerapan tenaga kerja, Nilai Tukar Petani. Peran strategis sektor pertanian tersebut masih dapat ditingkatkan karena keragaman Sumber Daya Genetik (SDG) pertanian yang tinggi, lahan yang luas, SDM yang melimpah, agroklimat yang kondusif.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bagi masyarakat Indonesia Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis karena berdasarkan PDRB Nasional, sumbangan sector pertanian masih mendominasi, hal tersebut karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Lahan dalam pandangan masyarakat agraris memiliki nilai ekonomis, sosial, bahkan nilai religius. Dalam perpspektif pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan adalah sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat seiring waktu.

Interaksi antara masyarakat dan lahan yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap penggunaan lahan ini memiliki potensi menimbulkan dampak negatife yang besar terhadap kelangsungan sumberdaya itu. Untuk itu adanya upaya pemantauan terhadap perubahan lahan agar dampak negatife akibat perubahan lahan dapat ditanggulangi dan upaya pengelolaan sumberdaya tersebut ke depan bisa direncanakan dengan tetap mengacu kepada optimalisasi manfaat sumberdaya secara lestari.

Kemajuan perekonomian dan peningkatan jumlah penduduk menjadi permasalahan, khususnya dengan lahan penghijauan yang semakin berkurang dikarenakan oleh proses pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Dampak dari aktifitas pembangunan akan mempengaruhi kualitas lingkungan, karena itu harus selalu diperhitungkan, baik dampak positif maupun dampak negatif yang harus selalu dikendalikan. Isu yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berkaitan dengan lingkungan antara lain, terkait dengan beberapa tantangan karakteristik perkotaan yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat mengontrol berjalannya proses pembangunan dan juga bekerjasama langsung dengan masyarakat sebagai pihak yang terkait langsung dan menjadi sasaran atau objek dalam pembangunan agar dapat menciptakan lingkungan yang baik dan berkesinambungan (Pranoto, 2009).

Tata kelola lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Penggunaan serta Pemanfaatan lahan-lahan pertanian pangan melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, tata kelola lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian tata kelola beserta pemanfaatan seluruh lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Di sisi lain, mobilisasi penduduk yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Tata kelola lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk khususnya penduduk agraris. Dampak langsungnya adalah terjadi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pergerakan penduduk pada usia-usia produktif perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman strategis terhadap ketahanan pangan berakibat Indonesia harus sering menjadi importir produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, menjadi ironi karena bangsa ini terkenal sebagai bangsa agraris. Angka perkembangan penduduk yang semakin meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap proses produksi pangan telah memunculkan kekuatiran akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan tentunya lahan pangan.

Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan mengenai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada dasarnya dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan tata kelola terkait dengan penguasaan atau pemililikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bertitik tolok dari uraian di atas terkait dengan kebijakan pemerintah dalam tata kelola area lahan pertanian dapat diketahui betapa pentingnya pelaksanaan perencanaan pengembangan pembangunan baik di masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga dari sini saya mencoba mengangkat judul penelitian tesis dalam rangka penyelesaian studi strata dua (S2) sebagai salah satu fenomena yang menarik untuk menguraikan "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Tata Kelola Lahan Pertanian Di Sulawesi Barat".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran sebagai peneliti memusatkan perhatian pada pertanyaan sebagai berikut :

1) Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat?
2) Faktor–faktor apakah yang menghambat dan menunjang implementasi kebijakan tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat?

C. Tujuan Penelitian

Mencermati rumusan masalah di atas sebagai permasalahan pokok yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk menjelaskan secara komprekhensif sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2) Untuk mengidentifikasi, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dan dan menunjang implementasi kebijakan pemerintah dalam implementasian kebijakan pemerintah dalam tata kelola area lahan pertanian, serta solusi yang ditawarkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemanfaatan lahan pertanian di Sulawesi Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah meliputi manfaat secara akademik (teoritik) dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Akademik (Teoritis)

   Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan akademik atau teoritis dalam mengembangkan disiplin ilmu yang ditekuni, khususnya teori-teori atau konsep-konsep yang terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola area lahan pertanian. Selain itu, menjadi bahan acuan atau rujukan bagi peneliti yang bermaksud melakukan kajian atau penelitian yang sama dengan perspektif yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan pula memberikan manfaat praktis dalam implementasi kebijakan pemerintah tentang tata kelola area lahan pertanian, khususnya Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hal ini, seperti diuraikan ada latar belakang bahwa terkait dengan tata kelola area lahan pertanian masih perlu ditingkat kepedulian semua pihak untuk memperoleh hasil maksimal seperti yang diharapkan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Pemerintah

Berbicara tentang implementasi kebijakan, maka tidak bisa melepaskan dari pertanyaan tentang kebijakan apa yang diimplementasikan. Berhubung dalam penelitian ini membahas kebijakan dalam organisasi pemerintah maka kebijakan yang dibahas ialah kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Konsep kebijakan publik (*public policy*) menurut Affan Suhaiman (1998) adalah "Sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola aktivitas tertentu dan merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus". Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan dengan pola aktivitas pemerintah mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan.

Kebijakan tersebut akhirnya disebut dengan kebijakan pemerintah, seperti yang didefinisikan oleh Ermaya Suradinata (1993) sebagai berikut: Kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah. Kebijakan Negara dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek, berpedoman pada ketentuan yang berlaku, berorientasi kepada kepentingan umum dan masa depan serta strategi pemecahan masalah yang terbaik.

Selanjutnya dalam proses kebijakan maka Nakamura dan Smallwood (2001) juga menjelaskan antara lain: Kebijakan publik merupakan intruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan. Beberapa lingkungan kebijakan dalam proses kelembagaan terdiri dari lingkungan pembuatan, lingkungan implemenatasi dan lingkungan evaluasi. Sebuah kebijakan hendaknya tersusun dengan baik sehingga mudah terarah. Kebijakan yang tersususn secara baik tentu memerlukan waktu untuk berkembang dan seyogyanya tetap mempertahankan hal-hal seperti yang diutarakan oleh J. Winardi (1990) sebagai berikut :

1. Memungkinkan penafsiran terbuka dan penilaian.
2. Bersifat konsisten dan tidak boleh ada dua kebijakan yang saling bertenatnagan dalam suatu organisasi.
3. Harus sesuai dengan keadaan yang berkembang.
4. Harus memebantu pencapaian sasaran dan harus dibantu dengan fakta-fakta yang obyektif.
5. Harus sesuai dengan kondisi-kondisi eksternal.

Selain itu, beberapa faktor yang ikut memperbaiki kualitas suatu kebijakan adalah seperti yang disampaikan oleh Bintoro Tjokroamidjojo (2003), bahwa: Jangan didasarkan pada selera seketika (*whims*) tetapi harus melalui proses yang rasional berdasarkan akal sehat. Pada dasarnya rumusan kebijakan memang harus bersifat obyektif baik sebagai dasar analisisnya maupun kondisi kebutuhan masyarakat atau obyek yang akan terkena dapak kebijakan yang akan diambil serta dapat memudahkan penentu kebijakan untuk mengadakan revisi atau perbaikan, jika ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan obyektif tadi. Dari beberapa proses kebijakan, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Implementasi kebijakan itu sendiri mengandung beberapa makna, sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus Webster (dalam Wahab, 2001) bahwa: "*to Implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying but*": (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Kalau pandangan ini diikuti, maka implementasi daripada kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan peradilan, perintah eksekutif, atau Dekrit Presiden).

Lebih lanjut oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (2001) memberikan penjelasan mengenai makna implementasi tersebut sebagai berikut: "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakasanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan arena-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, J.A.M. Maarse (dalam Amin, 2008) dengan demikian yang diperlukan dalam implementasi tersebut adalah suatu tindakan yang sah (implementasi suatu rencana peruntukan). Demikian dalam pelaksanaan kebijakan dapat melibatkan penjabaran lebih lanjut dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut oleh pejabat atau instansi pelaksana (Wibawa, 2002).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Implementasi kebijakan publik pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjangnya hingga jenjang pemerintahan yang terendah, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Karena itu secara umum, terdapat beberapa keadaan yang perlu dipertimbangkan dalam mengupayakan keberhasilan impiementasi kebijakan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Pressman (dalam Wibawa, 2002) sebagai berikut:

a. Impiementasi perlu didasarkan pada suatu teori yang tepat dalam menghubungkan perubahan dalam perilaku target dengan pencapaian tujuan kebijakan.
b. Adanya penjelasan arah dan structural kebijakan.
c. Adanya keterampilan teknis dan manajerial yang memadai di unit-unit kerja yang melaksanakan kebijakan.
d. Adanya dukungan-dukungan yang tepat dari partisipasi terkait.
e. Hubungan dan konflik antara berbagai partisipan jangan sampai mengurangi atau meniadakan pentingnya arti kebijakan yang dilaksanakan.

Beberapa pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan faktor-faktor dari dalam (intern) organisasi pemerintah dan faktor dari luar (ekstern). Di samping memperhatikan faktor intern dan ekstern organisasi, ada beberapa model yang dikembangkan oleh antara lain menyatakan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan atau suatu program adalah ditujukan dari tiga faktor seperti: (1) perspektif kepatuhan {*compliance*} yang mengukur implementasi dari kepatuhan *street level bereau crats* terhadap atasan mereka; (2) keberhasilan implementasi diukur dari

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, dan (3) implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan. Dengan demikian apabila suatu kebijakan publik memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan dengan memperhatikan prosedur-prosedur yang ada, maka diharapkan akan menghasilkan kebijakan yang tepat pada sasaran yang diinginkan.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama- sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisilain merupakan fenomena yang kompleks, munkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran *(output)* maupun sebagai hasil. Sementara itu menurut pendapat Van Mater dan Van Horen dalam Winarno (2005), proses implementasi sebagai *"those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior decisions"* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat/kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Grindle dalam abdul Wahab (2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur- prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk masalah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Dengan demikian, yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah tindakan- tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana peruntukan. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam perbuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Unsur-unsur mana yang harus dipenuhi agar hukum (dalam hal ini perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrument (kebijakasanaan publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah penting baik secara teoritik maupun praktis, oleh karena perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan hukum dan prilaku sosial. Sementara itu, kebijakan adalah jenis tindakan administrasi negara yang berasal dari kewenangan direksi, pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijaksanaan pelaksanaan ketentuan undang-undang.

Kebijakan dibuat oleh pejabat administrasi negara dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Eksistensi kebijakan adalah konsekuensi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

atas negara hukum yang membebankan tugas kepada pemerintah, yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum dan berlaku bagi setiap warga negara.

Abdul Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa peraturan kebijakan kerap tampil dalam bentuk dan format lain, seperti nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman, dan sebagainya, bahkan juga tampil dalam petunjuk lisan (kepada bawahan) yang memang tidak mempunyai bentuk dan format.

B. Tata Kelola Lahan Pertanian

Lahan memiliki beberapa pengertian yang diberikan baik itu oleh FAO maupun pendapat para ahli. Menurut Purwowidodo (1983) lahan mempunyai pengertian sebagai suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Lahan juga diartikan sebagai permukaan daratan dengan benda-benda padat, cair bahkan gas (Rafi'i, 1985). Definisi lain juga dikemukakan oleh Arsyad yaitu lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang seperti hasil reklamasi laut,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti yang tersalinasi. (FAO dalam Arsyad, 1989).

1. Pengertian Lahan

Lahan memiliki pengertian yang hampir serupa dengan sebelumnya bahwa pengertian lahan adalah suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang. (FAO dalam Sitorus, 2005).

Selanjutnya terkait dengan sifat lahan, sebagaimana diungkapkan oleh Arsyad (1989), pengertian sifat lahan ialah "Atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapat diukur atau diperkirakan, seperti tekstur tanah, struktur tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, temperatur, darinase tanah, jenis vegetasi dan sebagainya". Sifat lahan merupakan suatu penciri dari segala sesuatu yang terdapat di lahan tersebut yang merupakan pembeda dari suatu lahan yang laiumya." Sifat lahan menunjukkan bagaimana kemungkinan penampilan lahan jika digunakan untuk suatu lahan. Sifat lahan menentukan atau mempengaruhi keadaan yaitu bagaimana ketersediaan air, peredaran udara, perkembangan akan kepekaan erosi, ketersediaan unsur hara, dan sebagainya. Prilaku lahan yang menentukan pertumbuhan tersebut disebut kualitas lahan. Sifat-sifat lahan terdiri dari beberapa bagian yaitu karakteristik lahan, kualitas lahan, pembatas lahan, persyaratan penggunaan lahan, perbaikan lahan (Jamulya dan Sunarto, 1991).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Karakteristik lahan, adalah suatu parameter lahan yang dapat diukur atau diestimasi, misalnya kemiringan lereng, curah hujan, tekstur tanah dan struktur tanah. Satuan parameter lahan dalam survey sumbardaya lahan pada umumnya disertai deskripsi karakteristik lahan.

b. Kualitas lahan, mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk penggunaan tertentu. Kualitas lahan dinilai atas dasar karakterist lahan yang berpengaruh. Suatu karakteristik lahan yang dapat berpengaruh pada suatu kualitas lahan tertentu, tetapi tidak dapat berpengaruh pada kualitas lahan lainnya.

c. Pembatas lahan, merupakan faktor pembatas jika tidak atau hampir tidak dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh produksi yang optimal dan pengelolaan dari suatu penggunaan lahan tertentu. Pembatas lahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

   1) Pembatas lahan permanen, pembatas lahan yang tidak dapat diperbaiki dengan usaha-usaha perbaikanlahan (land improvement).

   2) Pembatas lahan semetara, pembatas lahan yang dapat diperbaiaki dengan cara pengelolaaan lahan.

d. Persyaratan penggunaan lahan, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

   1) Persyaratan ekologikal, contohnya ketersediaan air, ketersediaan unsur hara, ketersediaan oksigen, resiko banjir, lingkup temperatur, kelembapan udara, dan periode kering.

   2) Persyaratan pengelolaan, contonya persiapan pembibitan dan mekanisasi selama panen.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Persyaratan konservasi, contohnya control erosi, resiko komplen tanah, resiko pembentukan kulit tanah.

4) Persyaratan perbaikan, contohnya pengeringan lahan, tanggap terhadap pemupukan.

e. Perbaikan lahan, adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lahan pada sebidang lahan untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan produksi pertanian. Perbaikan lahan mutlak dilakukan agar kulaitas lahan dapat terus terjaga dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

2. Pengertian Pertanian

Pengertian pertanian menurut Kaslan A. Tohir, adalah suatu usaha yang meliputi bidang-bidang seperti bercocok tanam (pertanian dalam arti sempit), perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengelolaan hasil bumi dan pemasaran hasil bumi (pertanian dalam arti luas). Dimana zat-zat atau bahan-bahan anorganis dengan bantuan tumbuhan dan hewan yang bersifat reproduktif dan usaha pelestariannya.

Menurut Mubyarto (1989), Ilmu Ekonomi Pertanian adalah termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu kemasyarakatan yaitu ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya serta hubungannya antarmanusia. Dalam hal ini yang dipelajari adalah perilaku petani dalam kehidupan pertaniannya, dan mencakup juga persoalan ekonomi lainnya yang langsung berhubungan dengan produksi, pemasaran, dan konsumsi petani atau kelompok petani.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropik, karena sebagian besar daerahnya berada di daerah tropik yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Di samping pengaruh khatulistiwa, ada dua faktor alam lainnya yang ikut memberi corak pertanian Indonesia. Pertama, bentuknya sebagai kepulauan, dan kedua, topografinya yang bergunung-gunung. Dalam hubungan ini letaknya di antara dua lautan besar, yaitu lautan Indonesia dan lautan Pasifik serta dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, juga ikut mempengaruhi iklim Indonesia, terutama perubahan arah angin dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Bentuk tanah yang bergunung-gunung memungkinkan adanya variasi suhu udara yang berbeda-beda pada suatu daerah tertentu. Pada daerah pegunungan yang makin tinggi, pengaruh iklim tropik makin berkurang dan digantikan oleh semacam iklim subtropik (setengah panas) dan iklim setengah dingin (Mubyarto, 1989).

Pada kenyataannya, tanaman-tanaman pertanian iklim subtropik dan tanaman iklim sedang seperti teh, kopi, kina,sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi komoditi penting dalam perdagangan domestik maupun internasional. Hal itu disebabkan iklim yang mendukung serta penduduk yang sebagian besar masih bermata pencaharian di sektor pertanian (Mubyarto, 1989).

3. Pembangunan Pertanian

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat, khususnya di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Jika para perencana dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakatnya yang hidup di sektor pertanian. Peran pertanian sebagai tulang punggung perekonomian nasional terbukti tidak hanya pada situasi normal, tetapi terlebih pada masa krisis.

a. Syarat-Syarat Pembangunan Pertanian

Keberhasilan pembangunan pertanian memerlukan beberapa syarat atau pra kondisi yang untuk tiap daerah berbeda-beda. Pra kondisi tersebut meliputi bidang-bidang teknis, ekonomis, sosial budaya dan lain-lain. Menurut A. T Mosher dalam Mubyarto ada lima syarat yang harus ada dalam pembangunan. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka terhentilah pembangunan pertanian, syarat tersebut adalah: (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani; (2) teknologi yang senantiasa selalu berkembang; (3) tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal; (4) adanya perangsang produksi bagi petani, dan (5) tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

b. Tahap-tahap Pembangunan Pertanian

Menurut M. Todaro (2006), ada tiga pokok dalam evolusi produksi pembangunan pertanian sebagai berikut:

1) Pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah,
2) Produk pertanian sudah mulai terjadi dimana produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersial atau pasar, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula.

Pada tahap ini produk pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial. Modernisasi pertanian dari tahap tradisional (subsisten) menuju pertanian modern membutuhkan banyak upaya lain selain pengaturan kembali struktur ekonomi pertanian atau penerapan teknologi pertanian yang baru. Hampir semua masyarakat tradisional, pertanian bukanlah hanya sekedar kegiatan ekonomi saja, tetapi sudah merupakan bagian dari cara hidup mereka. Pemerintah yang berusaha mentransformasi pertanian tradisional haruslah menyadari bahwa pemahaman akan perubahan-perubahan yang mempengaruhi seluruh sosial, politik dan kelembagaan masyarakat pedesaan adalah sangat penting. Tanpa adanya perubahan-perubahan seperti itu, pembangunan pertanian tidak akan pernah bisa berhasil seperti yang diharapkan.

c. Permasalahan Pertanian

Dalam pengembangan sektor pertanian di negara kita, kita tidak bisa begitu saja menutup mata dan mengabaikan setiap kendala yang terjadi karena dalam setiap usaha pasti menemui batu kerikil yang menjadi penghambat dalam kemajuan. Begitu pula yang kita lihat pada sektor pertanian di Indonesia banyak sekali kendala atau faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan sektor pertanian misalnya seperti ketersediaan lahan, keterbatasan modal, kondisi iklim yang kurang mendukung dan lain-lain. Perlu kita kaji demi penemuan solusinya dalam penuntasan masalah tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berikut beberapa penjelasan umum mengenai problema yang menghampiri para petani di Indonesia yang terperinci sebagai berikut:

d. Kondisi lahan pertanian di Indonesia

Luas kepemilikan lahan yang dimiliki oleh petani di Indonesia rata-rata kecil mengingat harga tanah yang semakin mahal sedangkan kemampuan para petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah minim ditambah harus membeli lahan yang harganya semakin melonjak. Yang memungkinkan hanya bisa menggarap lahan milik orang lain sehingga hasilnya pun harus dibagi dua.

Semakin sempitnya lahan untuk bertani karena penyebaran pembangunan gedung-gedung industry yang bertambah jumlahnya disetiap lokasi. Hal ini tentunya dapat mengurangi wilayah para petani untuk bercocok tanam. Sedangkan kebutuhan manusia akan pangan semakin meningkat tidak diimbangi oleh ketersediaan lahan dan pembangunan gedung-gedung industry yang tidak terencana tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Sedangkan pada daerah-daerah pedalaman masih banyaknya "Lahan Tidur" yang artinya lahan tersebut belum tergarap maupun tersentuh oleh tangan-tangan manusia sementara lahan disuatu wilayah strategis cenderung menjadi rebutan dengan harga yang mahal. Ini mencerminkan bahwa penyebaran penduduk diwilayah Indonesia yang belum merata.

Banyaknya lahan para petani yang belum bersertifikat menambah dampak buruk bagi masa depan para petani yang menyebabkan terjadinya persengketaan antara pihak petani dan pihak yang mencoba merampas hak

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

milik petani dimana posisinya memanfaatkan kesempatan pada lahan yang belum berlabel pemilik. Bahkan kerap terjadi persengketaan antara petani dengan pihak pemerintah dalam kepemilikan lahan.

e. Masalah dari petani sendiri dan mentalitasnya

Pendidikan formal petani yang masih rendah menyebabkan pengetahuannya dalam pengembangan sektor pertanian tidak berkembang dan cenderung monoton hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tanpa menciptakan inovasi-inovasi terbaru demi peningkatan hasil pangan yang berlimpah. Hasil panen yang tidak seberapa menyebabkan petani tidak memiliki modal dalam pengembangan usahanya ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kehidupan para petani kurang sejahtera di wilayah Indonesia. Serta menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, saat ini, 50 juta penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.

Kaum petani cenderung menggantungkan hidupnya pada pemerintah dan lebih bersikap pasrah pada kondisi kehidupannya pada saat ini. Seharusnya mereka lebih meningkatkan jiwa kewirausahaanya dalam pengembangan sector usaha diberbagai bidang dan jangan hanya terpacu pada sector pertanian yang hasilnya diperoleh pada periode dan musim-musim tertentu.

f. Masalah Teknologi

Sistem pengalihan teknologi dari tradisional menjadi modern dalam pengelolaan pangan,belum mampu diterima secara luas oleh para petani yang lebih banyak menggunakan peralatan tradisional seperti : cangkul, arit, dll.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Yang pada kenyataannya lebih banyak memakan waktu dan tenaga. Dibanding menggunakan peralatan dan teknologi modern yang telah diterapkan dinegara-negara luar. Penerapan teknologi di negara kita terkadang kurang tepat pada sasaran, dimana disatu sisi peralatan teknologi tersebut mampu membantu dan meningkatkan kualitas pangan tetapi disisi lain peralatan tersebut merusak ekosistem yang ada tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu adanya sebuah penyuluhan besar-besaran dalam penyampaian informasi serta pendidikan bagi para petani dalam pengambangan buduaya pertaniannya serta peragaan alat pertanian yang berteknologi modern sehingga mampu meningkatkan hasil panen para petani demi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak serta pensejahteraan kehidupan para kaum petani di wilayah Indonesia. Perlu pula adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan para pemerintah disektor pertanian guna penggalangan dana dalam peningkatan sector pertanian di Indonesia agar memberikan fasilitas yang layak dan tepat bagi para petani dalam pengeloaan lahannya.

Menurut Sitorus (2005), sumberdaya lahan (*land resource*) adalah lingkungan fisik yang terdiri dari iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang ada di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan. Dalam hal ini lahan juga mengandung pengertian ruang (space) atau tempat. Sumberdaya lahan merupakan sumberdaya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sumberdaya lahan diperlukan dalam setiap kegiatan manusia. Penggunaan sumberdaya lahan khususnya untuk aktifitas

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pertanian pada umumnya ditentukan oleh kemampuan lahan atau kesesuaian lahan, dan untuk penggunaan daerah industri, pemukiman dan perdagangan ditentukan oleh lokasi ekonomi yaitu jarak sumberdaya lahan dari pusat pasar.

Lebih lanjut didefinisikan lahan potensial untuk pertanian dan lahan tersedia untuk pengembangan pertanian. Lahan potensial untuk pertanian adalah lahan yang secara biofisik terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian. Sesuai atau cocok berarti lahan tersebut secara teknis-agronomis mampu mendukung pertumbuhan tanaman dan/atau perkembangan ternak secara optomal. Jika lahan tersebut dikelola dengan baik tidak akan mengganggu kelestarian sumberdaya dan lingkungan. Lahan potensial belum mempertimbangkan aspek sosial dan hukum, seperti status kepemilikan lahan dan peruntukannya, namun sudah mempertimbangkan penetapan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung. Lahan tersedia untuk pengembangan pertanian adalah lahan potensial (sesuai) secara fisik untuk pertanian yang saat ini belum dimanfaatkan baik untuk pertanian maupun non pertanian, yaitu lahan yang ditumbuhi oleh alang-alang atau semak belukar.

Mencermati penjelasan di atas, pada perinsipnya sama dengan lahan potensial, lahan tersedia juga belum mempertimbangkan status kepemilikan, baik secara adat maupun undang-undang agraria. Oleh sebab itu lahan potensial dan lahan tersedia dapat berada pada kawasan budidaya yang dapat berupa lahan basah (sistem sawah) dan lahan kering yang sudah diusahakan, atau berada pada kawasan budidaya hutan (hutan produksi atau hutan konversi, hutan tanaman

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

industri atau kawasan Hak Pengusahaan Hutan), baik yang dikelola Perhutani dan Perkebunan Negara maupun swasta).

Pasaribu (2007) berpendapat bahwa bidang pertanian memiliki korelasi positif dengan kedaulatan dan ketahanan pangan. Namun secara faktual terdapat beberapa permasalahan krusial dan menjadi isu serius di negara kita, yaitu antara lain: (1) Kemampuan Indonesia di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri relatif telah dan/atau sedang menurun cukup signifikan, (b) Indonesia berada dalam keadaan sedang "rawan pangan", bukan karena tidak ada pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari supply luar negeri dan ketergantungannya semakin besar dan (c) Kurangnya daya dukung sektor pertanian yang komprehensif, termasuk di dalamnya ketersediaan lahan pertanian.

Masalah lahan pertanian terutama pertanian pangan diantaranya berakar dari masalah rendahnya nilai land rent lahan-lahan pertanian. Setiap jenis penggunaan lahan (pertanian dan non pertanian) memiliki nilai land rent yang berbeda. Jenis penggunaan lahan dengan keuntungan komparatif tertinggi akan mempunyai kapasitas penggunaan lahan terbesar, sehingga penggunaan lahan tertentu akan dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan nilai land rent tertinggi. Demikian juga dengan penggunaan lahan pertanian, meskipun lebih lestari kemampuannya dalam menjamin kehidupan petani, tetapi hanya dapat memberikan sedikit keuntungan materi atau finansial dibandingkan dengan sector industri, pemukiman dan jasa lainnya sehingga konversi lahan pertanian ke penggunaan lain tidak dapat dicegah (Rustiadi dan Wafda, 2008).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kelangkaan sumberdaya lahan bersangkut paut dengan pertumbuhan penduduk dan persaingan permintaan (*competing demands*) terhadap lahan. Ada kecenderungan di masyarakat negara-negara berkembang termasuk Indonesia bahwa sebagian kelebihan daya beli pada golongan masyarakat berpenghasilan tinggi disalurkan dalam bentuk investasi pada lahan/tanah (Sitorus, 2004). Alih fungsi lahan adalah sebuah mekanisme yang mempertemukan permintaan dan penawaran terhadap lahan dan menghasilkan kelembagaan lahan baru dengan karakteristik sistem produksi yang berbeda. Fenomena alih fungsi lahan adalah bagian dari perjalanan transformasi struktur ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang memusat di wilayah perkotaan menuntut ruang yang lebih luas ke arah luar kota bagi berbagai aktifitas. Sebagai akibatnya wilayah pinggiran yang sebagian besar berupa lahan pertanian sawah beralih fungsi (konversi) menjadi lahan nonpertanian dengan tingkat peralihan yang beragam antarpriode dan wilayah (Dahuri dan Nugroho, 2004). Oleh karena itu, diperlukan sebuah aturan/regulasi yang dapat menekan dan mengendalikan laju alih fungsi lahan, sehingga lahan-lahan pertanian yang ada dapat terlindungi dari kegiatan alih fungsi. Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan kenyataan terjadinya konversi lahan subur pertanian dan degradasi lahan yang kian masif. Sementara keberlanjutan lahan subur yang ada tidak terjamin dan pencetakan lahan sawah baru relatif kecil. Padahal ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan conditio sine-quanon untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan (*sustainable agriculture*) (Pasaribu, 2007).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kedaulatan pangan adalah hak manusia, komunitas dan negara untuk mendefinisikan kebijakan pertanian, tenaga kerja, perikanan, pangan dan lahan yang sesuai secara ekologi, sosial, ekonomi dan budaya mereka. Esensi dari kedaulatan pangan diharapkan tidak memiliki ketergantungan dengan pihak lain. Untuk dapat menjamin kedaulatan pangan di indonesia, salah satu isu penting adalah ketersediaan lahan yang saat ini dianggap sudah kritis. Krisis sumberdaya lahan ini ditandai dengan turunnya kualitas lahan (pertanian), konversi lahan pertanian (yang lebih cepat dari pertambahan lahan pertanian baru), lahan petani yang semakin sempit (fragmentasi lahan), akumulasi penguasaan lahan pada sedikit pihak, keterbatasan lahan vs peningkatan kebutuhan untuk pangan dll, dan reformasi agraria yang belum berjalan.

Sistem keterkaitan konversi lahan dengan berbagai komponen sistem ketahanan pangan nasional merupakan sistem dengan keterkaitan yang sangat kompleks. Kebijakan yang terkait dengan pengendalian konversi lahan pada sisi produksi pangan ditentukan oleh luas lahan produksi dan produktivitas lahan, sedangkan luas lahan produksi pertanian ditentukan oleh pengembangan atau pemeliharaan irigasi dan pembukaan, pencetakan lahan baru yang selanjutnya ditentukan oleh ketersediaan lahan potensial yang belum dikembangkan dan lahan pertanian kering serta kebijakan perencanaan zonasi/tata ruang/sistem keagrariaan. Ketersediaan lahan pertanian kering akan mempengaruhi kegiatan konversi lahan pertanian. Selanjutnya sistem produktivitas lahan ditentukan oleh kapasitas SDM pertanian dan fragmentasi lahan pertanian yang selanjutnya menentukan *land rent* lahan pertanian dan pendapatan petani.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pembangunan dan pertanian dapat berjalan berdampingan hanya jika kebijakan perencanaan penggunaan lahan diberlakukan dengan ketat. Kebijakan pelestarian lahan pertanian akan efektif, jika dapat mempengaruhi dan meningkatkan nilai *land rent* dalam empat cara, yaitu: (1) Dapat meningkatkan nilai produktif lahan pertanian, (2) Dapat menstabilkan, mengurangi, atau menghilangkan nilai konsumtif atas lahan pertanian, (3) Dapat menghilangkan nilai spekulatif lahan pertanian yang tidak efisien, yang bisa terjadi hanya jika nilai spekulatif dihubungkan dengan dampak situasi perkotaan, tidak efisiennya subsidi pembangunan perkotaan, dan kurang menghargai penyediaan barang publik sumberdaya lahan dan (4) Dapat menghilangkan sindrom kefanaan, yaitu ketidakpercayaan di kalangan petani pada sektor pertanian.

C. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Tersedianya sumberdaya lahan pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan sangat berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu: (1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan; (2) Produktifitas lahan; (3) Fragmentasi lahan pertanian; (4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian; (5) Sistem irigasi; (6) Land rent lahan pertanian; (7) Konversi; (8) Pendapatan petani, (9) Kapasitas SDM pertanian serta; (10) Kebijakan di bidang pertanian (Rustiadi dan Wafda, 2008). Pencegahan dan pengendalian terhadap adanya alih fungsi lahan terutama sawah perlu dilakukan, mengingat :

1. Konversi lahan sawah beririgasi teknis adalah ancaman terhadap upaya untuk mempertahankan swasembada pangan nasional.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Dari segi lingkungan dan pelestarian sumberdaya alam, ekosistem sawah ternyata relatif stabil dengan tingkat erosi yang relatif kecil.
3. Dari sudut pandang struktur sosial budaya masyarakat Indonesia, alih fungsi lahan sawah akan menyebabkan ketidakseimbangan hubungan sistematik antara pelaku usaha pertanian dan lahannya karena sawah merupakan pengikat kelembagaan perdesaan sekaligus menjadi *public good* yang mendorong masyarakat perdesaan bekerja sama lebih produktif (Sabiham, 2008).

Pembangunan dan sektor pertanian dapat berjalan berdampingan hanya jika kebijakan perencanaan penggunaan lahan diberlakukan dengan ketat. Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang PLPPB diharapkan menjadi salah satu kebijakan yang dapat mengatur tentang perencanaan penggunaan lahan, khususnya lahan pertanian pangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009, yang dimaksud dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Undang-undang ini digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melindungi lahan pertanian pangan dalam rangka ketahanan dan kedaulatan pangan nasional .

Selanjutnya berkenaan dengan istilah lahan pertanian pangan berkelanjutan ini, pada Undang Undang No. 41/ 2009 dapat dijelaskan beberapa definisi terkait, yaitu :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
b. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
c. Pertanian pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
d. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan kedaulatan pangan nasional (Pasal 1 angka 3).

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi : (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan (3) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Rencana PLP2B dilakukan berjenjang, dimana rencana PLP2B nasional menjadi acuan pada perencanaan PLP2B provinsi. Sedangkan rencana PLP2B provinsi dijadikan acuan dalam perencanaan PLP2B kabupaten/Kota .

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian dan lahan cadangan yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berada di dalam dan/atau diluar KP2B ditentukan dengan menggunakan beberapa kriteria, yaitu :

1) Kesesuaian lahan, KP2B ditetapkan pada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
2) Ketersediaan infrastruktur, yaitu KP2B ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian pangan, diantaranya sistem irigasi, jalan dan jembatan.
3) Penggunaan lahan aktual (Kondisi Existing), kriteria lain yang digunakan dalam menetapkan KP2B adalah dengan melihat bentuk/kondisi penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan lahan yang merupakan bentuk alami maupun buatan manusia.
4) Potensi teknis lahan, potensi teknis lahan merupakan salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam menetapkan KP2B. Yang dimaksud dengan potensi teknis lahan adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.
5) Luasan satuan hamparan lahan, dalam menetapkan KP2B dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, disebutkan bahwa kawasan yang dapat ditetapkan menjadi KP2B harus memenuhi kriteria: (a) Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B dan/atau LCP2B; (b) Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, provinsi dan/atau nasional.

a) Kriteria Sistem Pertanian Berkelanjutan

Kriteria sistem pertanian berkelanjutan, yakni:

(1) Keberlanjutan Secara Ekonomi

Pola pertanian yang dikembangkan bisa menjamin infestasi dalam bentuk tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan petani, dan hasil yang didapat petani mencukupi kebutuhan keluarganya secara layak. Keberlanjutan ekonomi berarti juga meminimalkan atau bahkan meniadakan biaya eksternal dalam proses produksi pertanian. Dalam poin keberlanjutan ekonomi ini, masih banyak terlihat bahwa petani (dan pertanian) kita belum sustain secara ekonomi dalam pengelolaan pertaniannya. Sebagai contoh, di lapangan kita banyak menjumpai petani yang harus (terus-menerus) berutang menjelang musim tanam (untuk biaya produksi dan alat). Ketergantungan petani atas input dari luar (terutama pupuk dan pestisida) adalah bukti paling nyata. Jadi harus memulai (saat ini juga) memperkenalkan kepada para petani kita beberapa alternatif model pertanian, sehingga kemandirian petani lebih

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

terjamin, selain itu juga ramah lingkungan. Di beberapa tempat lain, sistem pertanian hutan-tani (*agroforestry*) justru dapat menjadi jalan keluar.

(2) Keberlanjutan Ekologi

Keberlanjutan ekologis adalah upaya mengembangkan agroekosistem agar memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kurun waktu yang lama melalui pengelolaan terpadu untuk memelihara dan mendorong peningkatan fungsi sumber daya alam yang ada. Pengembangan sistem juga berorientasi pada keragaman hayati (*biodiversity*).

(3) Keadilan Sosial dan Kesesuaian dengan Budaya Lokal

Selain berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan, syarat mutlak sistem pertanian berkelanjutan adalah keadilan sosial, dan kesesuaian dengan budaya lokal. Yakni penghargaan martabat dan hak asasi individu serta kelompok untuk mendapat perlakuan adil. Misalnya adanya perlindungan yang lebih tegas atas hak petani dalam penguasaan lahan, benih dan teknologi lokal yang sering "dibajak" oleh kaum pemodal.

Sistem yang harus dibangun juga menyediakan fasilitas untuk mengakses informasi, pasar dan sumberdaya yang terkait pertanian. Hal mana harus menjamin "harga keringat petani" untuk mendapat nilai tukar yang layak, untuk kesejahteraan keluarga tani dan keberlanjutan modal usaha tani. Khususnya akses atas lahan harus kembali dievaluasi dalam rangka menegakkan keadilan, dengan tanpa membedakan jenis kelamin, posisi sosial, agama dan etnis. Contoh adanya ketimpangan keadilan adalah (dalam konvensi di Indonesia) bila istri melakukan transaksi hak atas tanah, oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Notaris akan dimintakan surat kuasa dari suaminya. Sementara itu, budaya pertanian lokal sering kali dilecehkan. Misalnya, sistem ladang berpindah orang Dayak sering dituduh merusak lingkungan (yang benar, orang Dayak menggilirkan lahan secara berputar/siklus, bukan berladang berpindahpindah). Padahal sistem itu justru melestarikan lingkungan dan sudah teruji berabad-abad. Namun kebiasaan orang Dayak menggulirkan siklus lahan ini dijadikan kambing hitam atas dosa lingkungan dari jaringan penjarah kayu serta penjarah hutan hak ulayat suku.

Menurut Anwar Hadi (2005), jika kita mengadopsi definisi pembangunan berkelanjutan dari WCED (Word Commision on Environent and Development) maka pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diorientasikan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, memelihara integritas ekologi, keadilan sosial dan kesempatan menentukan nasib sendiri.

Bedasarkan definisi pembangunan berkelanjutan dari WCED, Organisasi Pangan Dunia mendefinisikan pertanian berkelanjutan sebagai manajemen dan konservasi basis sumberdaya alam, dan orientasi perubahan teknologi dan kelembagaan guna menjamin tercapainya dan terpuaskannya kebutuhan manusia generasi saat ini maupun mendatang. Pembangunan pertanian berkelanjutan menkonservasi lahan, air, sumberdaya genetik

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tanaman maupun hewan, tidak merusak lingkungan, tepat guna secara teknis, layak secara ekonomis, dan diterima secara sosial.

Peningkatan jumlah penduduk dapat menambah tekanan pada sumberdaya dan memperlambat peningkatan taraf hidup, hal ini disebabkan oleh distribusi sumberdaya. Pembangunan berkelanjutan hanya dapat di capai bila pembangunan demografi selaras dengan perubahan potensi produktif ekosistem. Pembangunan berkelanjutan harus tidak boleb membahayakan sistem alam yang mendukung kehidupan di muka bumi ini;atmosfer, air tanah dan makhluk hidup. Produksi pertanian hanya dapat dilestarikan dalam jangka panjang bila lahan, air dan hutan yang menjadi sandarannya tidak rusak. Diperlukan kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik yang melindungi sumberdaya untuk melestarikan dan bahkan meningkatkan produktivitas pertanian.

Dalam Wibawa (2005), penerapan gagasan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai keamanan pangan memerlukan perhatian yang bersistem terhadap pemulihan sumberdaya alam. Hal ini memerlukan pendekatan global yang difokuskan pada ekosistem pada tingkat nasional,regional dan global, dengan tata guna lahan yang terkoordinasi dan perencanaan yang seksama terhadap penggunaan air dan pemanfaatan hutan. Menurut Suryana (2005), visi pembangunan (pertanian) berkelanjutan ialah terwujudnya kondisi ideal adil dan makmur, dan mencegah terjadinya lingkaran malapetaka kemelaratan. Visi ideal tersebut diterima secara universal sehingga pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*) menjadi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

prinsip dasar pembangunan pertanian secara global, termasuk di Indonesia. Oleh karena itulah pengembangan sistem pertanian menuju usahatani berkelanjutan merupakan salah satu misi utama pembangunan pertanian di Indonesia.

b) Tata Guna Lahan

Selain sebagai penghasil tanaman pangan dalam hal ini padi, sawah juga memiliki banyak fungsi. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, penjaga kelestarian budaya serta memberikan suasana khas pedesaan. Selain itu sawah juga memberikan manfaat bagi lingkungan, yaitu sebagai pengendali banjir dan erosi, mendaur ulang air dan limbah organik. Di samping nilai positif, sawah juga memiliki nilai negatif yang berkaitan dengan lingkungan. Nilai negatif dimaksud adalah dibasilkannya gas metan oleh sawah, yang merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca. Sistem lahan sawah dipandang sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan ekosistem sawah relatif stabil dengan tingkat erosi dan pencucian hara yang kecil, serta tingkat efisiensi penggunaan air yang telatif tinggi karena adanya lapisan kedap air di bawah lapisan top soil.

Menurut Notohadiprawiro (1991), lahan merupakan kesatuan berbagai sumberdaya daratan yang saling berinteraksi membentuk suatu sistem struktural dan fungsional. Sifat dan perilaku lahan ditentukan oleh jenis sumberdaya dominan dan intensitas interaksi yang berlangsung antar sumberdaya. Sumberdaya lahan dapat mengalami perubahan karena

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

aktivitas manusia. Penggunaan lahan *(land use)* adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya,baik material maupun spiritual. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu (1) pengunaan lahan pertanian dan (2) penggunaan lahan bukan pertanian.

c) Konversi Lahan

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. Konversi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Konversi lahan merupakan suatu akibat adanya pertumbuhan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Menurut Rustiadi dan Reti (2008), hal tersebut tercermin dari : (1) pertumbuhan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap peggunaan lahan, (2) adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan primer, khususnya dari sektor pertanian dan pengolahan sumberdaya ke sektor sekunder (*manufactur*) dan sektor tersier (jasa). Dalam hukum ekonomi pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari aktivitas yang land rent nya rendah ke aktivitas yang land rent nya tinggi. Yang dimaksud dengan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

land rent adalah nilai keuntungan bersih dari aktivitas pemanfaatan lahan per satuan luas lahan dan waktu tertentu.

Tahapan dalam proses konversi lahan pertanian pada umumnya adalah sebagai berikut: (1) pelepasan hak kepemilikan lahan; (2) pemanfataan lahan pertanian tersebut untuk kegiatan non pertanian. Dampak lebih lanjut dari adanya konversi lahan pertanian adalah terganggunya ketahanan pangan, yang merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Hal ini dapat dijelaskan karena dengan berkurangnya lahan pertanian otomatis akan mempengaruhi produksi beras. Dimana kondisi seperti ini tidak mudah untuk segera dipulihkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut, yaitu:

(1) Konversi lahan bersifat *irreversible*, yaitu lahan pertanian yang telah beralih fungsi menjadi lahan non pertanian bersifat permanen. Karena dengan perubahan ini akan meningkatkan nilai lahan.

(2) Upaya pemulihan kondisi seperti semula dengan mencetak lahan pertanian baru memerlukan waktu yang lama.

(3) Keterbatasan sumberdaya lahan terutama di Pulau Jawa. Selain itu juga adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan pertanian dengan cara mencetak lahan pertanian baru dan berbaikan irigasi.

(4) Keterbatasan inovasi teknologi dalam peningkatan produktivitas padi sawah sehingga dapat mengatasi masalah penurunan produksi karena konversi lahan. Oleh karena itu penanganan masalah konversi lahan pertanian sebenarnya dapat ditempuh melalui tiga pendekatan yaitu: (1)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengendalikan pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada nonpetani; (2) mencegah alih fungsi lahan, dan (3) menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konversi lahan.

Menurut Irawan (2005), Konversi lahan pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Sedangkan persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu: (1) keterbatasan sumberdaya lahan; (2) pertumbuhan penduduk, dan (3) pertumbuhan ekonomi.

Luas lahan yang tersedia relatif terbatas, sehingga pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kelangkaan lahan yang dapat dialokasikan untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi cenderung mendorong permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian pada laju lebih tinggi dibanding permintaan lahan untuk kegiatan pertanian karena permintaan produk non pertanian lebih elastis terhadap pendapatan. Meningkatnya kelangkaan lahan akibat pertumbuhan penduduk, yang dibarengi dengan meningkatkan permintaan lahan yang relatif tinggi untuk kegiatan non pertanian akibat pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian.

Menurut Sumaryanto dan Suhaeti dalam Nurmanaf et al (2001), dampak konversi lahan dari aspek sosial ekonomi adalah kehilangan produksi pertanian dan nilai tambahnya, berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian, hilangnya kesempatan kerja pertanian dan pendapatan kerja yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dihasilkannya, irigasi yang dibangun dengan biaya besar tidak difungsikan dengan semestinya, timbulnya pencemaran dan degradasi lingkungan, dan hancurnya beberapa kelembagaan lokal yang selama ini menunjang pembangunan pertanian. Sementara itu, manfaat ekonomi yang diperoleh tidak memadai khususnya bagi masyarakat setempat.

d) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Sabiham (2008), pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: mantap secara ekologis, bisa berlanjut secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes. Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri diartikan sebagai sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Menurut Rustiadi dan Reti (2008), tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pangan nasional. Ketersedian lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu: (1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan; (2) Produktivitas lahan; (3) Fragmentasi lahan pertanian; 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian, 5) Sistem irigasi, 6) land rent lahan pertanian, 7) Konversi, 8) Pendapatan petani, 9) Kapasitas SDM pertanian serta 10) kebijakan di bidang pertanian.

Penetapan lahan pertanian abadi merupakan salah satu opsi kebijakan yang oleh sebagian pihak dianggap paling tepat untuk mencegah proses alih fungsi lahan pertanian. Pada dasarnya lahan pertanian abadi adalah penetapan suatu kawasan sebagai daerah konservasi, atau perlindungan, khusus untuk usaha pertanian. Alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian dilarang dengan suatu ketetapan peraturan perundang-undangan. Jika dapat dilaksanakan secara efektif maka pastilah konversi lahan di kawasan konservasi tersebut tidak akan terjadi. Secara teoritis, dengan asumsi dapat diefektifkan, opsi kebijakan inilah yang paling ampuh untuk mencegah konversi lahan pertanian (Simatupang dan Irawan, 2003).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah:

(1) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

(2) Menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

(3) Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan

(4) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(5) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat

(6) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani

(7) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak

(8) Mempertahankan keseimbangan ekologis

(9) Mewujudkan revitalisasi pertanian

Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 diatur bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Lahan pertanian yang dilindungi hanya dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : (1) dilakukan kajian kelayakan strategis; (2) disusun rencana alih fungsi lahan; (3) dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik, dan (4) disediakan lahan pengganti dari lahan yang dialihfungsikan.

e) Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan

Alasan utama pengendalian konversi lahan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu :

(1) Sudut pandang finansial

Konversi lahan merupakan ancaman bagi ketahanan pangan nasional. Upaya perbaikan konversi lahan diantaranya adalah perbaikan fasilitas irigasi dan pembukaan sawah baru,keduanya membutuhkan investasi untuk perbaikannya sangat besar,disamping memerlukan waktu yang lama.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(2) Sudut pandang pelestarian lingkungan

Sawah dipandang sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan, disebabkan oleh ekosistem sawah yang relatif stabil, dengan tingkat erosi dan pencucian hara yang kecil. Selain itu tingkat efisiensi penggunaan air sawah relatif tinggi karena adanya lapisan kedap air di bawah lapisan *top soil*. Maka dengan adanya konversi lahan dipandang akan sangat mengganggu upaya pelestarian lingkungan.

(3) Sudut pandang struktur sosial budaya masyarakat

Konversi lahan dapat mengganggu keseimbangan hubungan sistemik antara petani dengan lahannya. Sawah merupakan pengikat kelembagaan perdesaan. (Rustiadi dan Reti, 2008), Menurut Siamatupang dan Irawan,(2003), untuk mencegah dan mengendalikan kegiatan konversi lahan pertanian, sejauh ini pemerintah lebih terfokus pada pendekatan hukum yaitu dengan membuat peraturan dan perundang-undangan yang bersifat melarang konversi lahan pertanian, khususnya lahan sawah beririgasi teknis. Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis acuan instrumen hukum yang digunakan yaitu: (1) RUTRW yang mengatur lokasi kegiatan pembangunan termasuk lahan pertanian yang dapat dikonversi ke penggunaan di luar pertanian, dan (2) peraturan-peraturan yang mengatur prosedur pelaksanaan konversi lahan pertanian.

Mulyani, et al (2011) berpendapat bahwa agar terjadi keseimbangan antara peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pangan, strategi dan upaya pemanfaatan sumber daya lahan adalah sebagai berikut:

(a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada saat ini agar lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas (luasan) maupun kualitas (kesuburan/produktivitas).

(b) Perluasan areal pertanian antara lain dengan memanfaatkan lahan potensial di lahan basah maupun lahan kering. Pemanfaatan lahan potensial diprioritaskan untuk tanaman pangan, sedangkan pengembangan tanaman perkebunan/bioenergi diarahkan pada lahan kering dan lahan suboptimal.

(c) Percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi/kelembagaan, seperti reforma agraria untuk mempercepat perluasan areal pertanian, pemberdayaan masyarakat perdesaan, serta implementasi Undang-undang No. 41 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Budi Daya Lahan Pegunungan.

(d) Menghindari konversi lahan dari pertanian produktif ke nonpertanian dan dari lahan tanaman pangan ke tanaman nonpangan (perkebunan) melalui perbaikan sistem insentif dan subsidi bagi petani tanaman pangan dan penerapan secara tegas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009.

(e) Inventarisasi dan percepatan re-evaluasi lahan potensial untuk pengembangan pertanian, dengan memanfaatkan lahan terlantar yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sudah dilepas, lahan cadangan (reforma agraria), dan lahan suboptimal potensial, seperti lahan rawa pasang surut dan lebak.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Lahan pernah dilakukan pada Tahun 2016 oleh Nasriaty N. berjudul "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Mamuju Utara". Nasriaty (2016) berpendapat bahwa implementasi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Mamuju Utara belum berjalan maksimal, disebabkan *content of policy* (isi kebijakan) dalam bal sumberdaya masih mengalami kendala karena kurang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, meskipun dalam impelemtasinya sudah melibatkan kelompok sasaran, memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan derajat perubahan, menunjukkan ketepatan pengambilan keputusan implementasi, dan sudah memperkenalkan prosedur kebijakan melalui sosialisasi, sedangkan dalam hal *context implementation* (lingkungan implementasi) seperti kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat sudah ditunjukkan, karakteristik lembaga dan penguasa memiliki komitmen yang kuat menjalankan kebijakan, namun tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat masih rendah, seperti proses pembangunan yang dilakukan masyarakat secara individu maupun kelompok belum memiliki legalitas perizinan dan kebanyakan lahan yang menjadi usaha masyarakat tidak diperuntukkan untuk kebijakan RTRW.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sebelumnya, pada Tahun 2009 Abdul Wahid telah melakukan penelitian dengan judul "Identifikasi Penyimpangan Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan" sebagai akibat dibentuknya Provinsi Sulawesi Barat menjadi wilayah otonomi baru pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Abdul Wahid (2009) berkesimpulan bahwa Penyimpangan Implementasi Tata Ruang Sulawesi Selatan adalah akibat:

1. Penyimpangan luas wilayah, yaitu dengan terjadinya pemekaran Propinsi Sulawesi Barat yang berasal dari Kabupaten Majene, Polmas dan Mamuju sehingga luas wilayah berkurang dari semula 6.276,888 ha menjadi 4.600.170 ha.
2. Penyimpangan kependudukan, yaitu adanya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Kabupaten Barru dan Kabupaten Luwu Timur mengalami pertumbuhan. • Penyimpangan struktur ruang wilayah, yaitu hadirnya kota dan kabupaten baru hasil pemekaran antara lain : Kota Palopo, Malili sebagai ibu kota, Kabupaten Luwu Timur dan Belopa sebagai ibu kota Kabupaten Luwu.
3. Penyimpangan sektor ekonomi, yaitu adanya perubahan ekonomi berskala wilayah yang tidak atau belum tertuang dalam RTRWP.

Lebih lanjut, Abdul Wahid (2009) menyatakan bahwa Faktor Penyebab Penyimpangan Terjadinya penyimpangan dimana implementasi tata ruang tidak sesuai dengan Perda 44/2001 tentang RTRWP Sulawesi Selatan, disebabkan oleh beberapa factor, yaitu Pemekaran wilayah, Pertambahan penduduk, Dinamika

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pembangunan sektoral memunculkan sejumlah rencana pembangunan dan pelaksanaannya yang belum tercantum dalam RTRWP sementara pembangunan tersebut memiliki cakupan lintas wilayah, Kurangnya koordinasi perencanaan karena interkoneksitas kegiatan manusia tidak mungkin dibatasi oleh adanya batas administrasi kota atau kabupaten sehingga kegiatan lintas wilayah sangat mungkin terjadi.

Pada penelitian lainnya, MF. Anita Widhy Handari (2012) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang" berpendapat bahwa "faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi adalah sosialisasi, petugas, dana, respon implementor, pemahaman terhadap kebijakan, peraturan pendukung, SOP, koordinasi antar instansi, tingkat pendidikan, usia, kepemilikan lahan, alasan konversi, dukungan publik dan komitmen pelaksana, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, karena implementasi Undang-Undang No 41 Tahun 2009 berlaku secara nasional. Di Kabupaten Magelang implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut baru sampai pada tahap identifikasi lokasi dan belum ada suatu peraturan daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Belum adanya aturan daerah yang menetapkan tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini, menyebabkan dalam prakteknya di lapangan tidak ada kejelasan mengenai lahan yang dilindungi, sanksi pelanggaran maupun insentif yang akan diterima masyarakat jika tidak melakukan atau melakukan perlindungan lahan pertanian yang dimilikinya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

E. Kerangka Berpikir

Sebagaimana diketahui Provinsi Sulawesi Barat merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki luas area lahan pertanian serta nonpertanian yang sangat luas dan belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya. Kawasan agropolitan sendiri merupakan suatu program bersama antara ementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum secara Nasional yang mana telah dirintis mulai tahun 2002, dimana pendanaan dalam pelaksanaan program yang dimaksud yaitu sharing antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Kota.

Hakikatnya kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Selain itu, dalam Pembangunan Jangka Panjang yaitu terdapat suatu Agenda Percepatan pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur, pada sub agenda Revitalisasi pertanian pada program Pengembangan Agribisnis tertera kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan.

Hal ini juga dikuatkan dalam Rencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Barat 2014 – 2019, yaitu terdapat suatu arah pembangunan Misi, dimana arah pembangunan tersebut ditempuh memalui penguatan ekonomi yang didukung pengembangan pertanian dan agroindustri ataupun agrobisnis, sehingga dalam hal ini melalui

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tahap revitalisasi pertanian yang nantinya ditempuh melalui empat langkah pokok, yaitu: (1) meningkatkan kemampuan petani, dan penguatan lembaga pendukungnya; (2) meningkatkan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian dan perikanan; (3) meningkatkan pengamanan ketahanan pangan, dan (4) memanfaatkan butan untuk divesifikasi usaha, dan pendukung produksi pangan. Sehingga sasarannya adalah meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian secara signifikan, dan meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan, serta menumbuh kembangkan agrobisnis ataupun agroindustri dan agropolitan.

Menyadari hal tersebut, dalam penelitian ini dibatasi pada dua aspek atau indikator yang akan dikembangkan, yaitu kemampuan dan kualitas lahan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selanjutnya faktor penghambat dan penunjang dibatasi masing-masing dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan demografis sebagai faktor penghambat, serta faktor pemerintah dan masyarakat sebagai faktor pendukung.

Hal ini tidak terlepas dari pertanian di Indonesia yang mana lahan untuk pertanian sendiri semakin kritis, dikarenakan banyaknya pengubahan lahan pertanian menjadi non pertanian. Dengan kata lain pengkonversian lahan pertanian menjadi lahan non pertanian semakin cepat. Konversi lahan yang tidak terkendali disebabkan oleh pembangunan yang tidak merata serta kurangnya memperhatikan aspek lingkungan. Laju pertumbuhan dan pertmabahan penduduk yang cukup tinggi sendiri merupakan determinan utama konversi lahan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan berikut :

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Bagan Kerangka Pikir

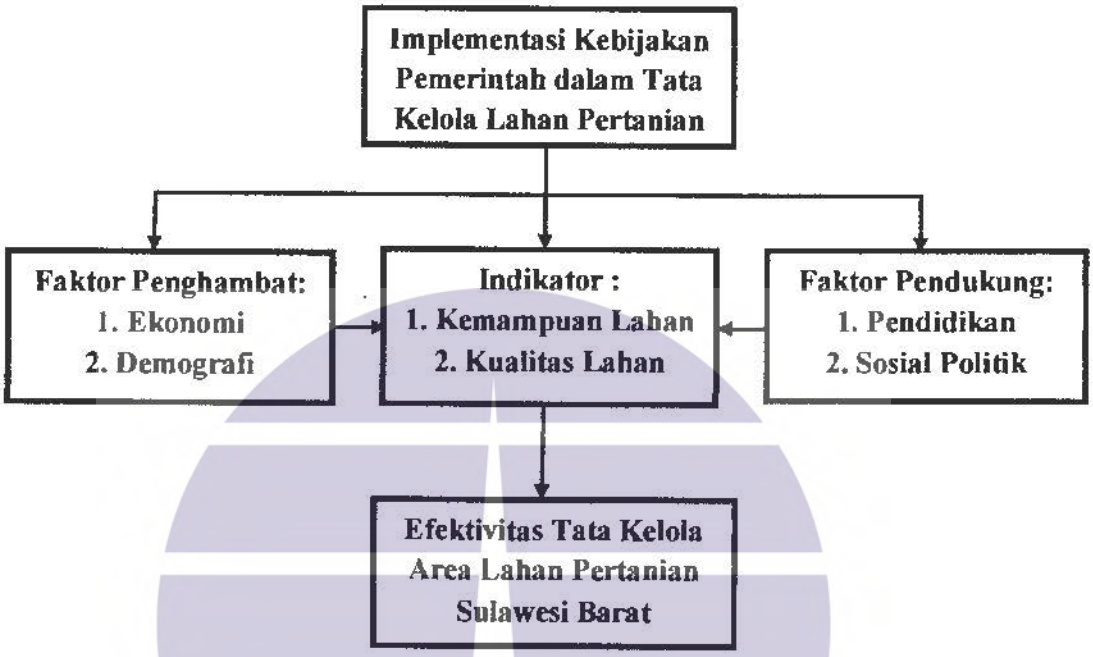

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Indonesia. Selain tenaga kerja yang terserap cukup besar, sektor ini juga masih mampu memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi perekonomian nasional. Akan tetapi, permasalahan yang paling mendasar dari sektor pertanian ini adalah semakin menyusutnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan.Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya Undang-Undang No.41/2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional dan Indonesia memiliki lahan pertanian abadi.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa kondisi yang semakin mengkhawatirkan atas konversi lahan tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan DPR mengesahkan lahirnya UU LP2B. Undang-undang ini diharapkan dapat menahan laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan permasalahan ini tidak cukup hanya pada investor saja yang masuk, namun adanya para pemilik lahan yang lebih memilih menjual tanahnya daripada mengelola tanah tersebut secara pribadi maupun berkelompok.

Motif dari pengkonversian lahan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan sehingga terjadi maraknya penjualan tanah. Dalam penelitian ini dibatasi pada aspek kemampuan dan kualitas lahan. Aspek lain yang disoroti adalah faktor penghambat, yaitu ekonomi dalam hal ini pendapatan hasil pertanian jauh lebih rendah dari pada non pertanian dan usaha pertanian dianggap melelahkan karena lama dan sulit bahkan apabila ada hama/penyakit. Sehingga lebih memilih mengganti lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Kemudian demografi (pertambahan penduduk) dimana hal ini membutuhkan ruang/lahan sehingga kebutuhan akan perumahan.

Sementara faktor pendukung antara lain pendidikan dan IPTEKS, dalam hal ini menjadikan masyarakat untuk mengambil jalan pintas dalam mengatasi masalah (mengeksploitasi lahan menjual tanah, merubah lahan pertanian ke non pertanian) tanpa memikirkan dampak untung dan ruginya. Selanjutnya faktor pendukung lainnya adalah sosial dan politik, perkemhangan masyarakat sebagai

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

efek adanya otonomi daerah,yang mana ingin menuntut hak atas pegelolaan tanah yang lebih luas. Sehingga menyebabkan konflik antar pihak.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola area lahan pertanian di Sulawesi Barat. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada yang membahas mengenai konversi lahan pertanian, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sagita Enggar Pratiwi, 2015. Tesis Administrasi Publik Unair (Universitas Airlangga), yang mengkaji mengenai Formulasi Kebijakan Pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang bagaimana implementasi dari kebijakan Pemerintah dalam mengatasai alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan perlindungan lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini diharapkan menjadikan suatu informasi dan referensi bagi para akademisi yang berkepentingan, terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam upaya mengendalikan lahan pertanian guna mempertahankan namanya sebagai Kawasan Agropolitan. Sehingga dalam hal ini pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan untuk dapat bersinergi bersama dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam tata kelola area lahan pertanian.

Kerangka pikir dalam penelitian ini terdiri dari implementasi kebijakan dan tata kelola area lahan pertanian. Konsep yang akan dipakai adalah proses maupun pendekatan dalam pelaksanakan suatu kebijakan dasar yang dilakukan oleh pelaksana kebijikan yang mana dalam benuk undang-undang ataupun perintah, dapat juga diartikan sebagai keputusan, yang telah dirumuskan oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

beberapa ahli. Konsep berikutnya adalah pengendalian dan pemanfaatan lahan pertanian serta strategi yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu untuk mengendalikan area lahan pertanian secara khusus di setiap kabupaten dan kota serta secara umum di Provinsi Sulawesi Barat.

Implementasi adalah suatu tahapan dalam kebijakan publik, dimana hal ini acapakali dianggap sebagai tahapan yang kurang berpengaruh, namun dalam kenyataan yang sebenarnya adalah, implementasi menjadi sangat penting karena apabila suatu kebijakan tidak mempunyai tahapan implementasi maka, kebijakan tersebut akan tidak berarti dan pelakasanaannya akan dilaksanakan dengan tidak benar. Sehingga untuk membahas lebih jauh lagi maka dalam konsep yang dikembangkan menjelaskan tentang pengertian dan aktivitas implementasi kebijakan.

Implementasi dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model, diantaranya adalah model implementasi kebijakan publik yang dikemukanan oleh Van Meter dan Van Horn adalah "tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya". Namun pada penelitian ini peneliti menggunakan metode elaborasi antara Merile S. Grindle dengan Mazmanian dan Sabatier. Peneliti menggunakan metode elaborasi teori ini karena pada salah satu teori tidak dapat menjelaskan fenomena yang ada sehingga peneliti menggunakan elaborasi.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum penelitian dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi atau mendeskripsikan sesuatu hal. Tujuan mengekspolorasi adalah tujuan yang berkaitan dengan upaya memperoleh makna dari hal yang diteliti. Perolehan makna tersebut dilakukan dalam suatu *setting* social tertentu. Tujuan mendeskripsi dari penelitian kualitatif berkaitan dengan penggambaran atau pemaparan dari hal yang diteliti. Penggambaran tersebut dapat berupa narasi, komparasi, dan asosiasi dari hal diteliti. (Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, 2014). Dengan tujuan tersebut, maka penelitian kualitatif akan berciri sebagai penelitian yang bersifat induktif dan idiografis (Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, 2014).

Pendekatan dan desain penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai bagian dari paradigma alamiah, dilakukan oleh peneliti dengan asumsi bahwa setiap konteks yang terkait dengan penelitian bersifat kritis sehingga masing - masing memberikan andil secara kontekstual terhadap data-data lapangan (Moleong,1993).

Creswell (2010) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti menyatakan rumusan masalah, bukan sasaran penelitian (seperti hasil-hasil akhir yang ingin diperoleh dalam penelitian) ataupun hipotesis-hipotesis (seperti prediksi-prediksi yang melibatkan variable-variabel dan pengujian statistic) (Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, 2014).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, dengan tujuan eksplorasi dan deskripsi, kegunaan penelitian kualitatif dapat berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaan teoretis dari penelitian kualitatif adalah tersusunnya kategori, modelatau hipotesis.sementara itu kegunaan praktis adalah tersedianya informasi yang dapat dijadikan landasan dalam pemehaman dan pengambilan keputusan mengenai suatu hal atau keadaan tertentu. (Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, 2014).

L.E. Locke (Creswell, 2010) menyatakan bahwa tujuan penelitian berarti menunjukkan "mengapa Anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin anda capai". Dalam hal ini, T.A. Schwandt (Creswell, 2010) menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian. tujuan penelitian kualitatif juga bisa menyatakan rancangan penelitian yang dipilih. Tujuan ini ditulis dengan istilah-istilah "tekmis" penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif (Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, 2014).

Lebih lanjut, dalam (Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, 2014), pernyataan Schwandt tersebut dapat dilengkapi dengan pernyataan Creswell (2010) tentang alasan diterapkannya pendekatan kualitatif sebagai berikut, "Pendekatan kualitatif dipilih sebagai jalan terbaik jika sedikitnya penelitian yang membahas fenomena/konsep tertentu, adanya topic baru, dan topic baru ini tidak pernah dibahas dengan sampel atau sekelompok individu tertentu atau teori-teori yang ada selama ini belum diterapkan sebagai landasan untuk meneliti sampel atau sekelompok individu".

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

A. Desain dan Tipe Penelitian

Studi tentang Implementasi Kebijakan Tata Kelola Lahan Pertanian di Sulawesi Barat merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif sebagai sebuah upaya untuk memberikan input terhadap proses pembangunan pertanian di Sulawesi Barat. Penelitian ini menitik beratkan pada pengkajian tata kelola atau pengelolaan lahan yang ideal yang disarikan dari beragam teori dan praktek tata kelola lahan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Pengamatan langsung pada obyek studi sesuai dengan lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan. Mengidentifikasi obyek-obyek yang ada pada lokasi penelitian meliputi ruang terbangun (*solid*), ruang tidak terbangun atau ruang terbuka (void) serta hubungan antar ruang-ruang (linkage), dengan melihat kondisi tata ruang sekarang, Setelah data lapangan dan literatur didapat sesuai fokus penelitian maka proses analisis dilakukan untuk mendapatkan kebijakan pengembangan kawasan pertanian di Sulawesi Barat.

Tipe penelitian adalah fenomenologi terkait Tata Kelola Pembangunan Pertanian di Sulawesi Barat. Pembangunan sektor pertanian di Sulawesi Barat pada dasarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Aktualisasi pelaksanaan pembangunan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program-program yang dapat mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat. Program ini akan terus dikembangkan dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya lokal.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kebijakan Pengembangan Kawasan Petanian, adalah suatu ruang geografis yang didelineasi oleh ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis pertanian termasuk penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen, pemasaran, serta berbagai kegiatan pendukungnya.

B, Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data utama yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau informan atau diperoleh dari pengamatan terhadap suatu kegiatan dan tempat tertentu, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang telah disahkan atau telah dipublikasikan. Dengan data tersebut, sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa orang, dokumen, kegiatan dan tempat. Sumber data informan, dalam penelitian ini informan merupakan sumberdaya manusia yang terlibat secara langsung dan menangani fungsi pengelolaan lahan. Dalam struktur pemerintah di Sulawesi Barat, terdapat beberapa instansi yang bersentuhan langsung dengan hal tersebut yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
2. Dinas Pertanian
3. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
4. Badan Pengelolaan Kawasan Hutan

Selain itu, di luar instansi pemerintahan, stakeholder yang terkait/terlibat adalah: (a) Masyarakat petani umumnya, dan (b) Lembaga penggiat lingkungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dokumen merupakan instrument tata kelola, dokumen yang diperlukan dan terkait dengan penelitan ini dapat berupa peraturan-peraturan, hasil kajian lingkungan dan tabulasi data sebagai berikut: (a) Peraturan Perundang-undangan; (b) Peraturan Pemerintah; (c) Peraturan Daerah; (d) Jurnal-jurnal perencanaan wilayah dan lahan; (e) Dokumentasi gambar dan video.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, selain berupa observasi dan wawancara, juga dapat berupa dokumentasi. Dalam hal ini, dokumentasi berarti semua publikasi atau data tercetak yang dihasilkan oleh seseorang atau suatu instansi. Ketika data dibedakan dalam kategori primer dan sekunder data yang dikumpulkan melalui dokumentasi tergolong ke dalam data sekunder. Di sisi lain, data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara tergolong ke dalam data primer (Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, 2014).

1. Pengumpulan data dengan observasi

   Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, (2014), C. Selltiz (Nazir, 1992) menyatakan bahwa observasi atau penagamatan baru tergolong sebagai teknik pengumpulan data jika memenuhi kriteria sebagai beikut:

   a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis;
   b. Pengamatan, berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan
   c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reabilitasnya.

Dari pendapat C. Selltiz dkk tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan teknik observasi dalam suatu penelitian bukanlah suatu putusan yang tiba-tiba. Penggunaan tersebut sejak awal sejak awal perancangan penelitian telah dikaji manfaatnya. Demikian pula teknikobservasi telah dipikirkan kaitannya dengan teknik pengumpulan data lainnya apabila digunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data. Dasar untuk mentukan saling keterkaitan antar teknik pengumpulan data tersebut adalah tujuan penelitian. Artinya, pilihan untuk menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan saling keterkaitan di antaranya adalah pertimbangan tentang seberapa banyak suatu teknik pengumpulan data tertentu dapat bermanfaat untuk mengumpulkan data yang menjawab petanyaan penelitian sekaligus tujuan penelitian (Muchlis Hamdi dan Siti Ismaryati, 2014).

Observasi dilakukan di wilayah Sulawesi Barat. Observasi yang dilakukan untuk penelitian ini adalah observasi terus terang dan tersamar. Dalam hal ini, peneliti mengatakan terus terang kepada subjek yang akan diteliti bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi yang diteliti mengetahui aktivitas dari awal hingga akhir penelitian. Namun, di lain waktu peneliti pun akan menyamarkan bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Hal ini guna mengungkapkan data yang dicari kemungkinan masih dirahasiakan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Observasi dalam melakukan penelitian sangatlah diperlukan. Sebagaimana dikatakan oleh Marshall dalam Sugiyono (2013) "*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*". Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam melakukan penelitian, tidak semua tindakan memiliki makna tertulis. Tindakan pun ada makna tidak tertulis, sehingga dengan adanya observasi ini peneliti akan lebih paham akan makna yang tidak tertulis. Makna yang tidak tertulis itulah yang dapat dijadikan data dalam pengumpulan data.

Dalam melakukan observasi, tentu saja ada objek yang harus diteliti. Objek penelitian yang harus dicermati oleh peneliti (Sugiyono, 2013) tersebut adalah :

1) Tempat, yaitu dimana interaksi dalam situasi sosial berlangsung. Tempat berlangsungnya observasi atau pengamatan dalam penelitian masalah sosial ini adalah di Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait tata kelola lahan.
2) Pelaku, orang-orang yang menjalankan peran tertentu. Pelaku disini adalah para partisipan, yaitu *stakeholders* yang manganic fungsi tata kelola lahan.
3) Kegiatan, yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial tertentu. Aktivitas yang diamati yaitu mengenai masalah sosial yang dialami petani setelah lahan pertanian dialih fungsikan ke lahan nonpertanian.

Keunggulan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi menurut Idrus (2009) ini ada beberapa, diantaranya:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a) Teknik pengamatan melalui observasi ini didasarkan kepada pengalaman secara langsung. Peneliti langsung mengamatinya ke lapangan. Sehingga dalam mencari fakta yang ada untuk pengumpulan data akan lebih jelas.

b) Teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Sehingga keadaan objek kecil kemungkinan untuk direkayasa.

c) Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data. Dalam pencarian data melalui observasi ini tentu saja akan selalu berkaitan antara kejadian satu dengan kejadian yang lainnya.

d) Sering terjadi keraguan pada peneliti, jangan-jangan yang dijaringnya ada "bias" dan memerlukan pengamatan ulang.

e) Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mengerti situasi-situasi rumit.

f) Dalam kasus-kasus tertentu, saat teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan, pengamatan menjadi alat yang sangat bermanfaat.

Adanya teknik observasi dalam pengumpulan data ini terjadi keraguan mengenai pertanggungjawabannya secara ilmiah. Namun Jehoda dalam Idrus (2009) memberikan batasan dalam kaidah teknik observasi ini, yaitu :

(1) Mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah dirumuskan.

(2) Direncanakan secara sistematis, bukan terjadi secara tidak teratur.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(3) Dicatat dan dihubungkan dengan proposi-proposi yang lebih umum, tidak hanya dilakukan untuk memenuhi rasa ingun tahu belaka.

(4) Dapat dicek dan dikontrol validitas dan reliabilitas ketelitiannya sebagaimana data ilmiah lainnya.

Melihat pemaparan di atas, peneliti akan mendapatkan kesempatan mengumpulkan data secara lebih mendalam, jelas dan secara terperinci sehingga data yang didapatkan akan terkumpul secara menyeluruh dan sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi secara langsung. Hal ini dikarenakan, fakta yang dikumpulkan guna pengumpulan data akan lebih terperinci. Dalam penelitian ini, observasi secara langsung akan dilakukan terhadap OPD yang menangani fungsi pengelolaan lahan di Sulawesi Barat. Dengan melakukan pengamatan langsung akan menemukan permasalahan sosial. Hal yang akan diamati atau diobservasi dalam penelitian ini adalah mengenai lingkungan fisik, baik lingkungan fisik wilayah secara umum maupun lingkungan fisik lahan pertanian, kepemilikan lahan pertanian dan pekerjaan utama penduduk desa. Selain itu, karena penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif, maka teknik observasi yang dilakukan adalah teknik observasi tidak terstruktur.

Menurut Idrus (2009), "observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa saja yang akan diobservasikan. Peneliti akan melakukan pengamatan kepada objek berdasarkan rambu-rambu penelitian saja karena dalam penelitian kualitatif ini

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

permasalahan yang ada di lapangan akan terus berkembang. Sehingga, dengan observasi tidak terstruktur ini data yang diperoleh akan lebih fleksibel.

2. Teknik pengumpulan data melalui wawancara

Selain teknik observasi, teknik wawancara dalam melakukan pengumpulan data pun dapat dilakukan. Menurut Sugiyono (2013), "wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu. Wawancara dilakukan agar mendapatkan data yang lebih spesifik daripada observasi. Karena teknik observasi hanya menarik kesimpulan sesuai dengan kasat mata. Sesuai dengan Susan Stainback dalam Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa: "*Interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation*". Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa dilakukan melalui observasi.

Kedua teknik yang telah disebutkan, baik observasi maupun wawancara terdapat kelebihan masing-masing. Tidak ada salah satu baik atau buruk karena kedua teknik tersebut sama-sama akan mengungkapkan tentang fakta-fakta yang ada di lapangan untuk dijadikan data peneliti. Wawancara yang dilakukan dapat digali secara lebih mendalam dan akurat untk kepentingan peneliti. Selanjutnya Esterberg dalam Sugiyono (2013) mengatakan bahwa : "*Interviewing is at the heart of social research. If you*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

look through almost any sociological journal, you will find that much social researcher is based on interview, either standardized or more in-depth". Interview merupakan hatinya penelitian sosial. Bila anda melihat jurnal dalam ilmu sosial maka akan anda temui semua penelitian sosial berdasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang lebih mendalam.

Wawancara menurut Sugiyono (2013) terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur, ini menggunakan instrument penelitian lengkap dengan alternatif jawabannya. Semua partisipan diberi pertanyaan yang sama. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti dibantu menggunakan tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang membantu jalannya waancara.
b. Wawancara Semiterstruktur, ini sudah termasuk ke dalam wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara ini berjalan secara bebas. Tujuannya adalah mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jika melakukan wawancara, peneliti hanya perlu mendengarkan dengan teliti kemudian mencatatnya.
c. Wawancara Tidak berstruktur, ialah wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara hanya digunakan hanya berupa garis-garus besar permasalahan. Dari ketiga jenis wawancara yang sudah dipaparkan diatas, dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara berstruktur. Tujuan menggunakan wawancara berstruktur adalah agar satu partisipan dengan partisipan lain mendapatkan pertanyaan yang sama. Jika

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

menggunakan wawancara berstruktur, peneliti akan lebih mudah dalam meneliti karena sudah ada pedoman wawancara.

Selain itu, dengan menggunakan wawancara berstruktur, permasalahan sosial akibat tata kelola lahan akan terbuka. Para responden pun akan lebih cepat tanggap dalam menanggapi permasalahan sosial yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Hal yang akan di wawancara oleh peneliti adalah mengenai permalasahan yang dialami oleh petani setelah adanya tata kelola lahan pertanian.

3. Studi Literatur

Peneliti menggunakan teknik studi literatur ini untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti berdasarkan teori yang relevan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji studi literatur yang relevan dengan penelitian masalah sosial akibat tata kelola lahan pertanian. Dalam penelitian, tidak harus selalu menganuati keadaan yang sedang berlangsung saja, tetapi dengan membaca hasil penelitian terdahulu akan diketahui perkembangan mengenai permasalahan yang sedang diteliti dan hasil penelitian pun akan semakin akurat.

Sesuai dengan Bogdan dalam Sugiyono (2013) mengatakan bahwa hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan autobiografi. Meskipun begitu, penelitian yang didasarkan dokumen terdahulu tentu tidak sepenuhnya objektif. Ada sebagian penelitian bersifat subjektif yang digunakan demi kepentingan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tertentu. Oleh karena itu, dalam memilih dokumen untuk dijadikan studi literatur demi kepentingan penelitian harus memilah setiap dokumen penelitian yang sudah ada.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah mendapatkan data lapangan. Dalam penelitan kualitatif, pengumpulan data yang dilakukan akan mengakibatkan variasi data yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan akan terus menerus adanya perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini akan bersifat jenuh karena pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara berulang-ulang.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) mengatakan " *The most and central difficulty in the use qualitative data is that methods of analysis are not well formulate*". Yang paling serius dan sulit dalam analisis data kualitatif adalah karena metode analisis belum dirumuskan dengan baik. Selanjutnya Susan Stainback dalam Sugiyono (2013) mengatakan bahwa : "*There are no guidelines in qualitative research for determining how much data and data analysis are necessary to support and assertion, conclusion and theory*". Belum ada panduan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan berapa banyak data dan analisis data yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan atau teori.

Analisis data adalah proses sistematis setelah mendapatkan data dari lapangan kemudian dijabarkan dan diinterpretasikan menurut kategori tertentu sehingga data yang sudah didapat akan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Menurut Sugiyono (2013), "analisis data dilakukan sebelum di lapangan, selama

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

di lapangan dan sesudah di lapangan." Hal ini di perkuat oleh Nasution dalam Sugiyono (2013) mengatakan bahwa: "Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian". Analisis data menjadi pegangan penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang mendasar. Namun pada kenyataannya, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan hanya pada saat proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) membagi analisis data ke dalam tiga bagian, yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification.

1. Analisis Data Sebelum di Lapangan

   Dalam penelitian kualitatif, peneliti pun telah melakukan analisis data. Analisis data ini dilakukan melalui pengamatan dan studi literatur terlebih dahulu. Studi literatur yang ada dijadikan acuan dalam melakukan penelitian. Sehingga dengan membaca literatur yang sudah ada peneliti dapat memprediksikan terlebih dahulu mengenai data yang ada di lapangan. Melalui studi literatur pun peneliti mendapatkan gambaran tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan adanya gambaran mengenai keadaan di lapangan, peneliti dapat menentukan secara lebih lanjut fokus penelitian.

2. Analisis Data di Lapangan

   Setelah mendapatkan gambaran melalui studi literatur yang ada, analisis data pun dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan. Pengumpulan data di lapangan ini berupa memilah dan memilih data yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Data yang ada di lapangan masih bersifat umum. Seorang peneliti, dalam mencari data yang ada di lapangan harus pandai memilah dan memilih data yang menunjang dengan penelitian yang di lakukan. Dalam menganalisis data di lapangan, ada beberapa model analisis yang dapat digunakan, seperti model Miles and Huberman. Model ini terbagi ke dalam tiga tahapan, yaitu :

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data reduction atau reduksi data adalah kegiatan memilah dan memilih datadata yang dibutuhkan oleh peneliti. Data yang terdapat di lapangan masih bersifat data mentah, data yang secara umum dan belum merujuk kepada hal yang diteliti secara lebih spesifik. Setelah data dipilah maka peneliti akan mendapatkan gambaran mengenai data yang ada di lapangan dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pencarian data selanjutnya. Data yang akan di reduksi biasanya akan dibagi kepada beberapa golongan untuk mempermudah peneliti menyusunnya.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah peneliti memilih data yang di reduksi, data tersebut dikumpulkan dan digolongkan berdasarkan kategori tertentu agar lebih memudahkan peneliti dalam menyusun data yang benar benar dibutuhkan. Namun, data yang dipilah tersebut tentu saja dimasukkan ke dalam kategori yang berhubungan dengan yang di teliti. Sehingga antara data satu dengan data yang lainnya akan saling berhubungan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data ini adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah data yang direduksi ditampilkan dan disesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan. Kesimpulan ini sifatnya dinamis, dapatberubah karena fakta yang ada di lapangan pun tidak akan selalu tetap keadaannya. Kesimpulan ditarik setelah reduksi data dan fakta yang ada di lapangan sesuai.

d. Uji Validitas dan Reliabilitas

Setiap hasil penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif dapat dicek kembali keakuratannya melalui uji validitas dan reliabilitas. Tujuannya adalah untuk mengcek data yang didapatkan oleh peneliti valid atau tidak. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif ini berbeda. Perbedaan uji validitas dan reliabilitas ini terletak pada hal yang akan diuji. Dalam penelitian kuantitatif, yang diuji validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian, sedangkan dalam penelitian kualitatif, yang diuji dalam validitas dan reliabilitas ini adalah data yang telah diperoleh dari lapangan. Susan Stainback (Sugiyono, 2013) menyatakan bahwa "penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek validitas".

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif ini meliputi :

1) Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data. Ketika melakukan perpanjangan pengamatan, antara peneliti dan narasumber akan saling terbuka satu sama lain, tidak akan ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber. Jika hal ini terjadi, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian. Susan Satainback (Sugiyono, 2013) mengatakan "*rapport is a relationship of mutual trust and emotional affinity between two or more people*". Rapport adalah hubungan kepercayaan dan emosional antara dua orang atau lebih. Hal ini terletak pada peneliti dan narasumber."

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian kualitatif ini sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan ketika peneliti melakukan wawancara dengan narasumber pertama kali, informasi yang didapatkan masih kemungkinan belum mendalam dan peneliti masih dicurigai keberadaannya. Dengan melakukan perpanjangan pengamata, peneliti akan membangun hubungan kepercayaan dan emosional sehingga informasi yang dicari akan lebih mendalam.

2) Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian ada triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu pengumpulan data"

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

(Sugiyono, 2013). Namun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tirangulasi teknik pengumpulan data.

Triangulasi teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk uji kredibilitas data dengan mengecek sumber data dengan menggunakan metode yang berbeda. Jika data yang didapatkan melalui observasi, maka uji kredibilitasnya pun menggunakan teknik observasi. Begitupun jika data yang didapatkan melalui wawancara, maka uji kredibilitasnya pun dilakukan dengan teknik wawancara.

Triangulasi data ini dilakukan melalui orang-orang yang peneliti wawancara, seperti buruh tani, petani penggarap, pemilik lahan tani dan pejabat desa setempat. Selain melalui wawancara, triangulasi data ini pun melalui observasi di lingkungan sekitar Desa Margahayu Selatan. Setelah mendapatkan hasil penelitian maka dikaitkan dengan studi literatur yang relevan untuk menunjang penelitian peneliti sehingga hasil penelitian pun menjadi kuat karena ditunjang oleh studi literatur berupa skripsi ataupun jurnal.

3) Mengadakan *Membercheck*

Membercheck ini adalah pengecekan data ulang oleh peneliti kepada narasumber. Tujuan dari membercheck ini adalah untuk mengecek sejauh mana data yang diberikan oleh narasumber kepada peneliti. Membercheck ini dilakukan ketikapeneliti telah mendapatkan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Membercheck yang dilakukan oleh peneliti ini dapat dilakukan secara individu atau berkelompok kepada narasumber.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Dalam penelitian ini, membercheck dilakukan kepada orang-orang yang telah peneliti wawancara, seperteni buruh tani, petani penggarap, pemilik lahan dan kepada pejabat desa setempat. Selain membercheck kepada orang-orang yang telah peneliti wawancara, pengecekan pun dilakukan setelah mendapatkan hasil observasi keadaan lingkungan. Setelah membercheck dilakukan maka hasil penelitian bisa disebut dengan valid jika sudah tidak ada variasi jawaban.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah administrative pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan melalui Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Secara astronomis, Provinsi Sulawesi Barat terletak antara 0°46'13,03" - 3°46'13,4" Lintang Selatan dan 116°47'22,6" - 119°52'17,07" Bujur Timur dengan luas wilayah 16.916,02 Km2 dan 22.228,64 Km2 wilayah laut (Perda RTRW Sulawesi Barat, 2014).

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sulawesi Barat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Tengah;

Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan;

Sebelah Barat : Selat Makassar;

Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Selatan.

Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 wilayah kabupaten, luas daratan masing-masing kabupaten, yaitu: Kabupaten Majene (947,84 km2), Kabupaten Polewali Mandar (1.775,65 km2), Kabupaten Mamasa (3.005,88 km2), Kabupaten Mamuju (4.999,69 km2), Kabupaten Mamuju Utara (3.043,75 km2), serta Kabupaten Mamuju Tengah (3.014,37 km2). Ibu Kota Provinsi Berada Di Kabupaten Mamuju (BPS, 2017).

Wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdiri atas dataran tinggi dan rendah. Di Sulawesi Barat terdapat 193 buah gunung dan yang tertinggi adalah Gunung

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter diatas permukaan laut. Umumnya setiap Kabupaten memiliki beberapa perbukitan dan pegunungan yang berpotensi menjadi cadangan untuk ekosistem guna mendukung pembangunan berwawasan lingkungan, juga terdapat garis pantai yang merupakan daerah dataran rendah yang berpotensi untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan darat dan laut seperti di Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene. Kabuapten Mamuju Utara dan Kabupaten Mamuju Tengah

Sulawesi Barat mempunyai delapan daerah aliran sungai utama, dengan jumlah daerah aliran sungai banyak yakni Kabupaten polewali Mandar, yakni 5 aliran sungai besar. Aliran sungai yang sangat panjang yakni Sungai Saddang yang wilayah alirannya meliputi Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan polewali Mandar serta Sungai Karama yang daerah aliran sungainya melintasi Kabupaten Mamuju hingga Kabupaten Mamuju Tengah. Daerah aliran sungai kedua sungai tersebut memanjang masing-masing hingga 150 km kearah hilir/laut.

Rata-rata Suhu udara harian adalah 22,4°C - 34,2°C. Provinsi Sulawesi Barat mempunyai kelembaban udara relative tinggi, berkisar antara 76,5 persen - 82,8 persen. Sedangkan kecepatan angin hampir diseluruh wilayah kabupaten di Sulawesi Barat umumnya merata setiap bulannya, yaitu berkisar 5 km/jam hingga 14 km/jam. Dengan Kelembaban udara yang relative tinggi dan adanya 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau menjadikan daerah ini masih sering terjadi penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan seperti DBD, Malaria, TBC, ISPA, diare dan peyakit lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

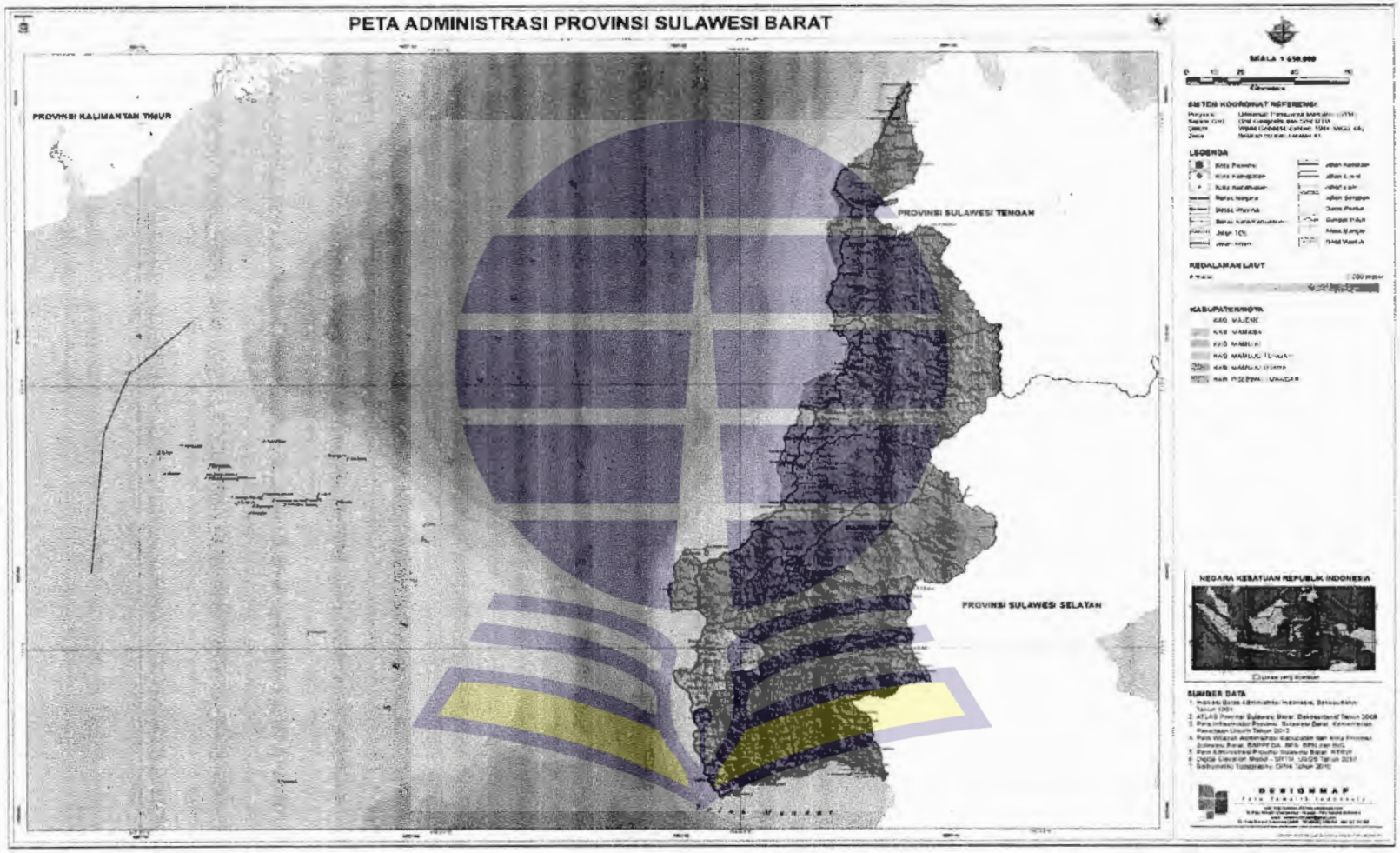

Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 1.306.478 jiwa yang terdiri atas 655.452 jiwa penduduk laki-laki dan 651.026 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 1,90 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,68. Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 mencapai 77 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang. Kepadatan Penduduk di 6 kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 211 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 41 jiwa/km2.

Bebarapa tahun terakhir produksi tanaman pangan Provinsi Sulawesi Barat terus meningkat. Produksi padi khususnya, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi padi mengalami peningkatan kurang lebih sebesar 18,77 persen dari 461.844 ton menjadi 548.536 ton. Dengan jumlah produksi padi sawah sebesar 492.122 ton dan padi ladang 56.414 ton, Provinsi Sulawesi Barat bisa dikatakan mampu memenuhi kebutuhan penduduknya tehadap padi. Produksi tanaman palawija di Sulawesi Barat diantaranya didukung oleh komoditas jagung yang nilai produksinya pada tahun 2016 mencapai kurang lebih 284.213 ton, ubi jalar sekitar 6.751 ton, ubi kayu 25.698 ton, kacang tanah 433 ton, dan kacang hijau 342 ton.

Produksi tanaman sayuran Sulawesi Barat di tahun 2016 didominasi oleh cabai dengan produksi sebanyak 3.686,6 ton, petsai sekitar 810,4 ton, dan bawang merah sekitar 302,3 ton. Sementara produksi kentang dan kubis hanya sekitar 136,8 ton dan 16,7 ton Salah satu sub sektor yang terus berkembang di Provinsi Sulawesi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Barat adalah perkebunan. Pada tahun 2016, produksi kelapa sawit dan kakao di Sulawesi Barat mencapai 344.560 ton dan 84.429 ton. Sementara itu, beberapa jenis produksi perkebunan lain seperti kelapa yang jumlah produksinya mencapai 36.862 ton, sagu 668 ton, dan kopi 4.171,41 ton.

Peternakan

Komoditas peternakan di Sulawesi Barat cukup beragam mulai dari ternak kecil, besar, unggas dan lainnya. Ternak besar masih menjadi salah satu komoditas yang banyak diusahakan oleh peternak di Sulawesi Barat. Sapi potong adalah salah satu yang paling besar jumlahnya yakni mencapai 85.417 ekor. Populasi kambing sekitar 163.180 ekor dan unggas yang umumnya adalah ayam kampung sekitar 4.445.160 ekor.

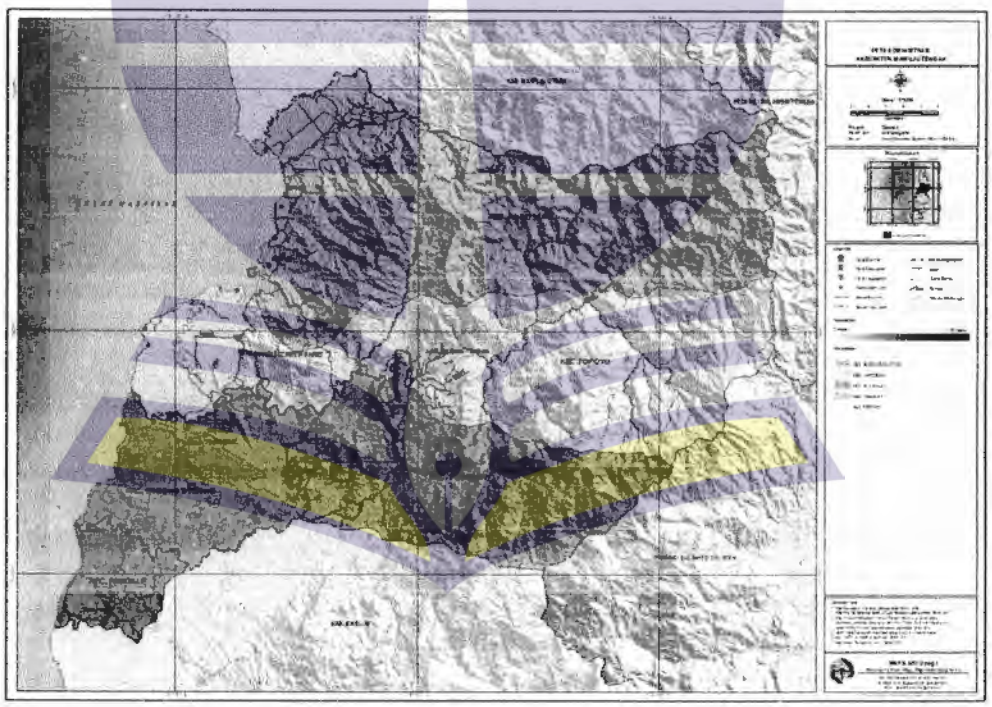

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Mamuju Tengah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

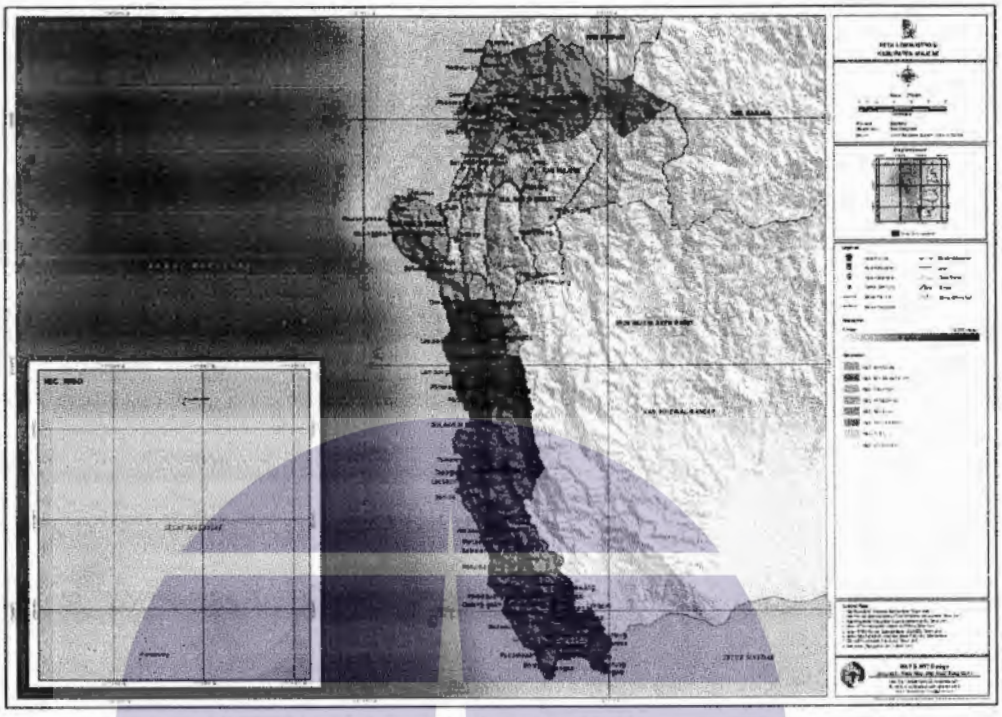

Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Majene

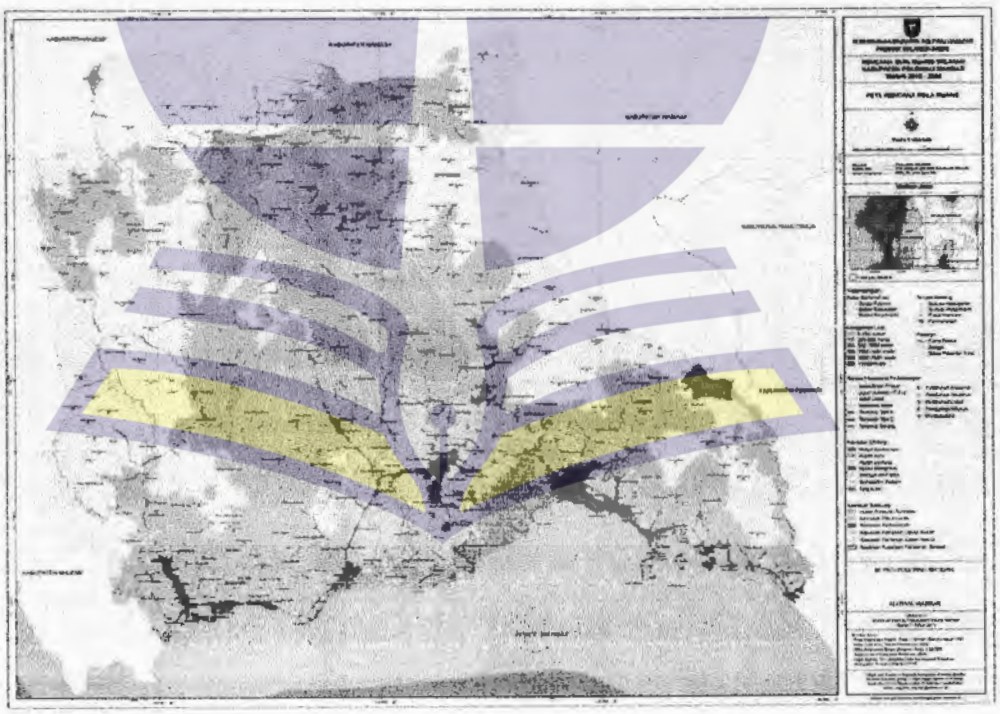

Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Polewali Mandar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

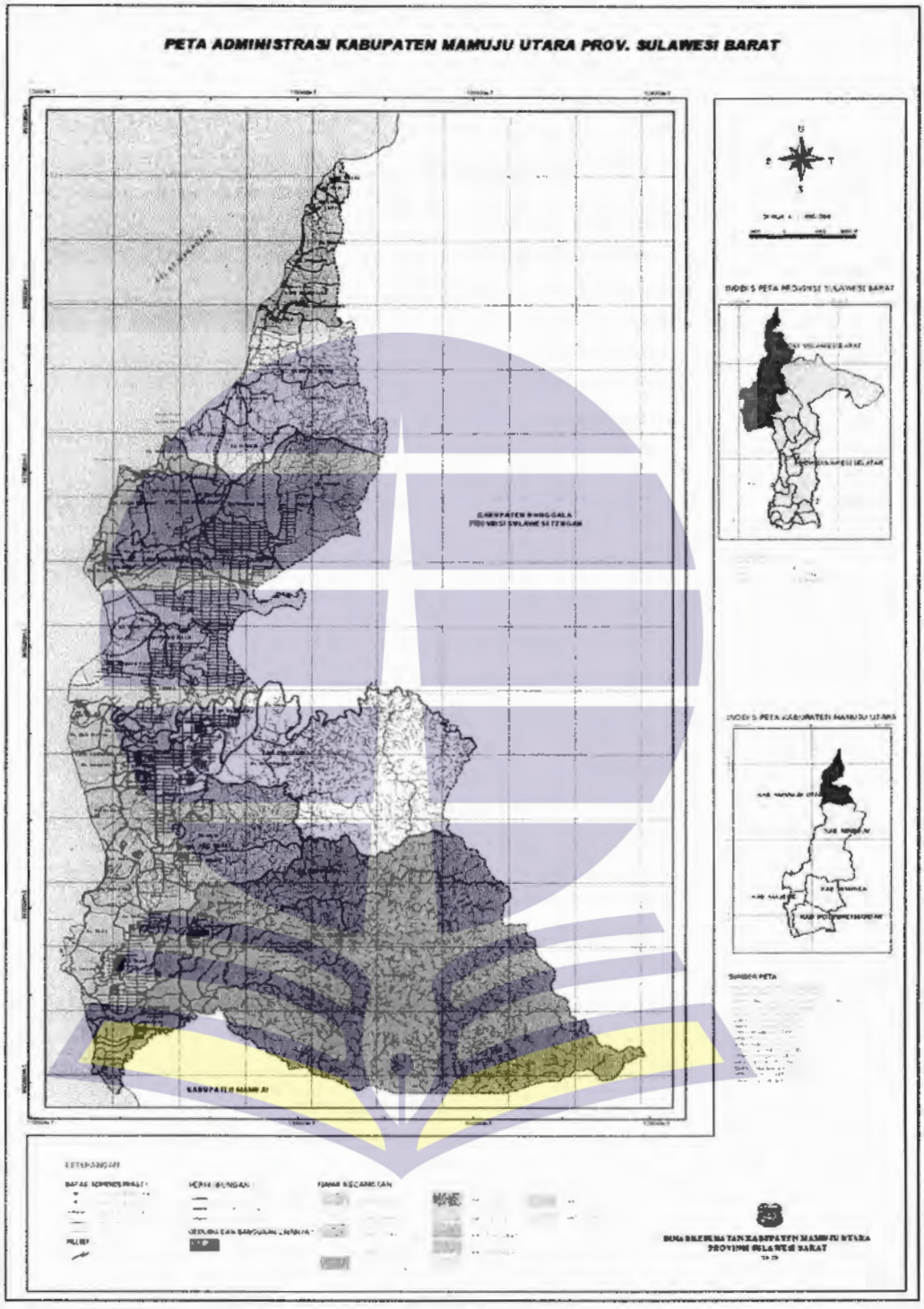

Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Mamuju Utara

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

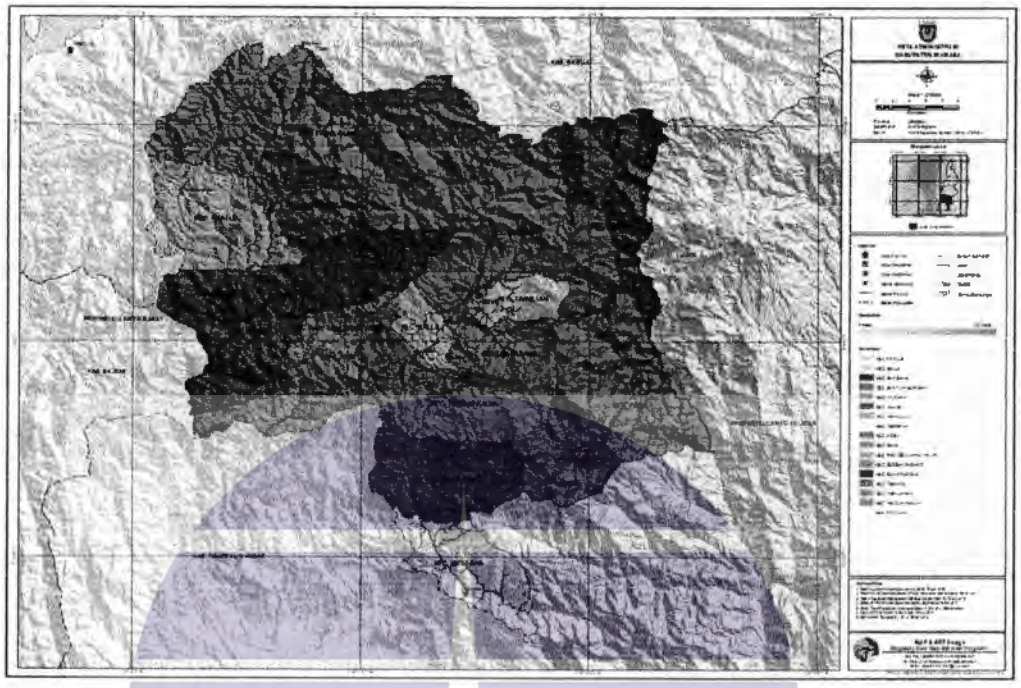

Gambar 6. Peta Administrasi Kabupaten Mamasa

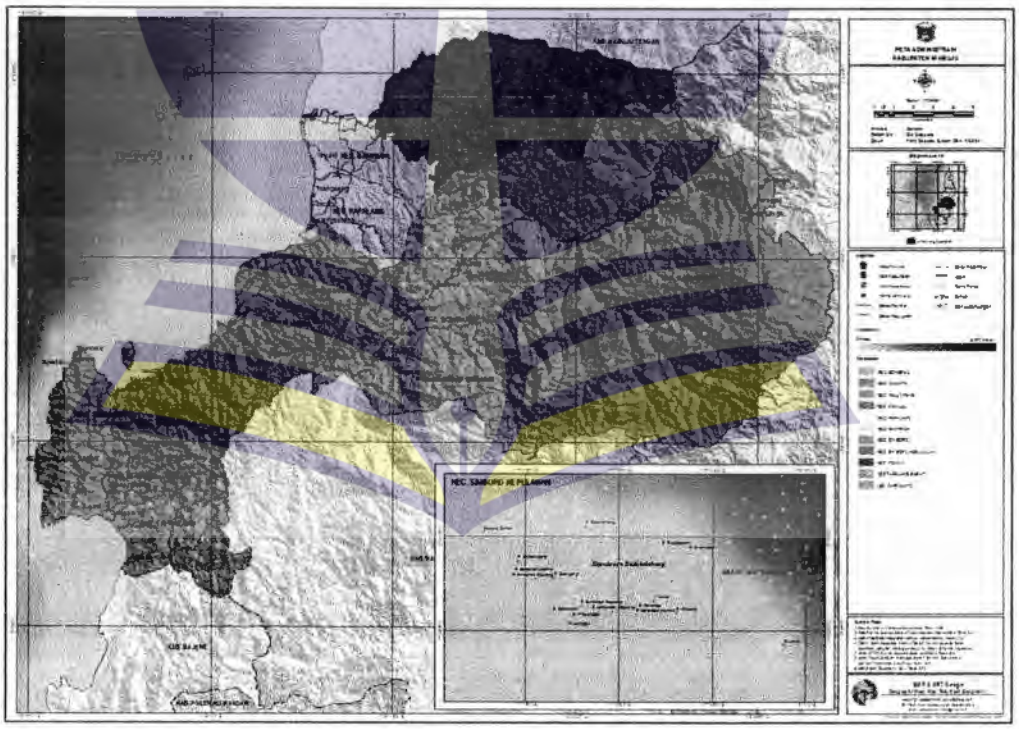

Gambar 7. Peta Administrasi Kabupaten Mamuju

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

B. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Tata Kelola Lahan Pertanian di Sulawesi Barat

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, mengatur tentang tata ruang wilayah Sulawesi Barat. Dalam Perda Tersebut, ditetapkan bahwa luas daratan 16.916,02 Km² dan 22.228,64 Km². Kawasan Hutan ditetapkan seluas 10.923,76 Km² (64% dari luas daratan), Kawasan Hutan tersebut terdiri Kawasan Taman Nasional Gandang Dewata seluas 2.142,01 Km², 9,89 Km² diperuntukkan menjadi calon Tanaman Hutan Rakyat (TAHURA), Hutan Lindung 4.520,3 Km² dan Hutan Produksi seluas 4.251,56 Km² Hutan Produksi.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Pembagian Alokasi (Pemanfaatan Wilayah Ruang)

Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	% Luas Kawasan Hutan Terhadap Luas Wilayah	Luas Lahan Pertanian dan Perkebunan				
				Luas Lahan Sawah Irigasi dan Non Irigasi (Ha)	Luas Lahan Tegal / Kebun, Ladang / Huma, dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan (Ha)	Luas Tanaman Perkebunan (Ha)	Jumlah	% Luas Lahan Pertanian dan Perkebunan ter Luas Wilayah
Mamuju	499,969	367,188	73	15,395	45,286	68,765	129,446	26
Majene	94,784	53,609	57	1,620	21,676	27,570	50,866	54
Polewali Mandar	177,565	89,283	50	18,546	44,527	80,509	143,582	81
Mamasa	300,588	202,614	67	12,876	39,990	31,361	84,227	28
Pasangkayu	304,375	168,547	55	4,437	93,948	94,037	192,422	63
Mamuju Tengah	301,437	212,135	70	11,189	30,619	74,360	116,168	39
Jumlah	1,678,718	1,093,376	65	64,063	276,046	376,602	716,711	43

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tata ruang wilayah Sulawesi Barat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 18 ayat 2, Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional". Sehingga, pengaturan wilayah masih dapat dimungkinkan karena luasan kawasan hutan terproyeksi seluas 65% dari luas wilayah daratan, meskipun berdasarkan data tersebut terdapat ketimpangan bahwa luas lahan pertanian dan perkebunan adalah 716,711 Ha atau 43% dari luas wilayah dataran.

Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah provinsi yang produktif dan berwawasan lingkungan, mendukung pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan berbasis pada perkebunan, pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, perdagangan, industri, pariwisata dan pendidikan.

Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumberdaya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada masyarakat Provinsi Sulawesi Barat yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

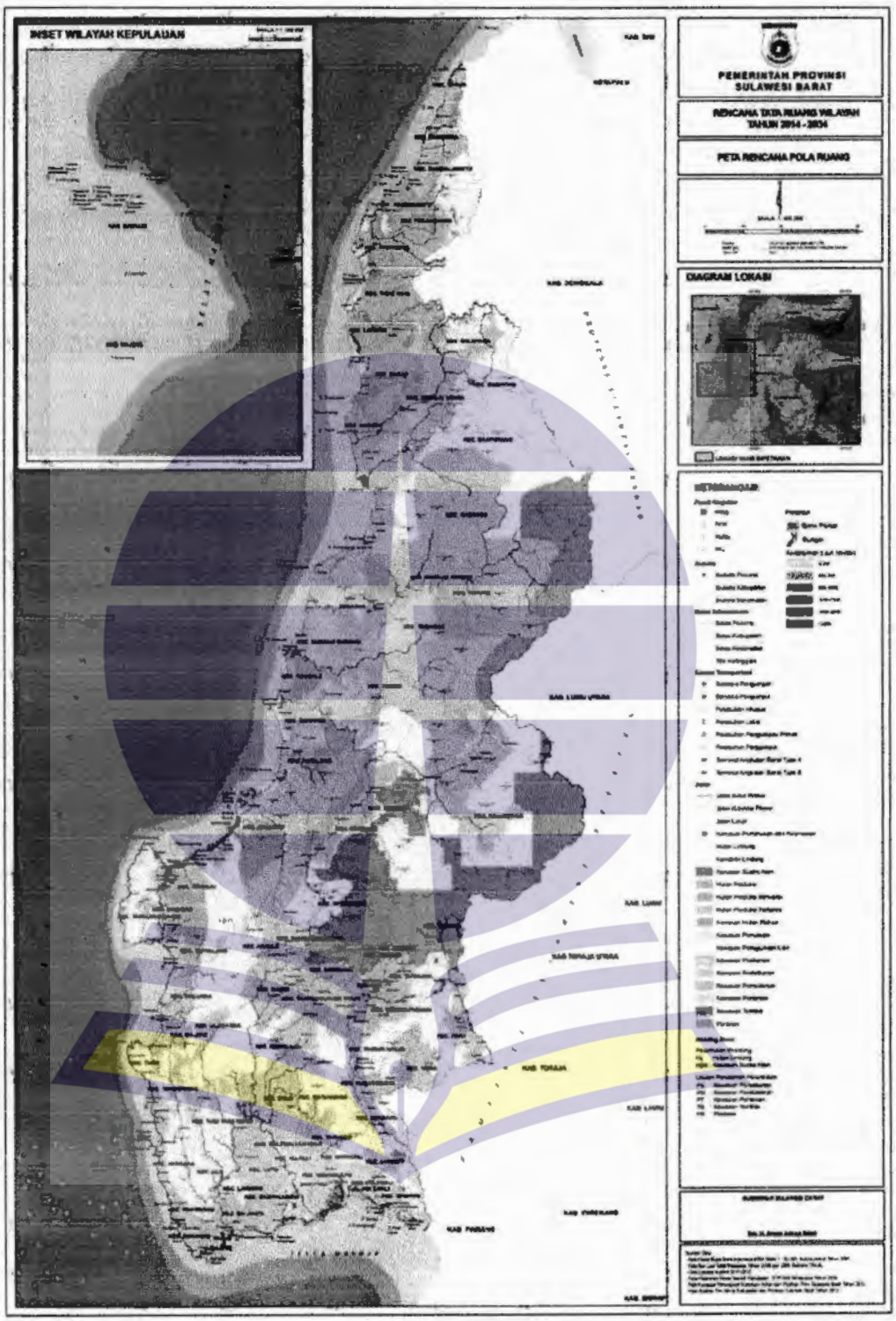

Gambar 8. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Secara geografis, letak Provinsi Sulawesi Barat sangat strategis yaitu terletak diantara 4 (empat) provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional, yang memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi ke depan. Sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan yang terkandung di bumi Provinsi Sulawesi Barat merupakan sumberdaya yang sangat potensial untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang semuanya itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat.

Ruang merupakan sumberdaya yang tidak mengenal batas wilayah. Upaya penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkesinambungan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, penataan ruang Provinsi Sulawesi Barat menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

Hal tesebut sesuai dengan keterangan informan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

> *"Berdasarkan PERDA RTRW No. 1 Tahun 2014, proporsi peruntukan lahan telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan dan karakteristik lahan, kawasan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, bahkan dilengkapi dengan peta pengembangan infrastruktur untuk menunjang aktifitas pertanian di Sulawesi Barat".*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang penataan ruang berdasarkan pendekatan sistem, fungsi-fungsi pokok kawasan, wilayah-wilayah administratif, kegiatan dalam kawasan, dan nilai kearifan local strategis kawasan. Dalam rangka pengembangan Provinsi Sulawesi Barat, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota di sekitarnya. Penataan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang.

1. Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi adalah:
    a. Sebagai arahan bagi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat;
    b. Sebagai landasan kebijakan tentang arahan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan kondisi wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
    c. Sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
    d. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e. Sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat; dan
f. Sebagai rujukan/referensi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Kegunaan rencana tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan dan program pembangunan tahunan. Rencana pola Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kawasan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B);
b. Kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mamuju Utara, Mamuju Tengah, dan Mamuju dan perkebunan kakao di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
c. Kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan dan perdagangan Belang-Belang sebagai pusat pengolahan komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan serta sebagai outlet dan pintu masuk komoditi dari dan ke seluruh wilayah Sulawesi Barat serta wilayah perbatasan provinsi tetangga;
d. Kawasan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tobadak di Kabupaten Mamuju Tengah;
e. Untuk mendukung MP3EI sesuai dengan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Barat maka dikembangan kawasan terpadu pelabuhan, bandara, industri, perdagangan, pergudangan dan peti kemas Mamuju – Tampapadang – Belangbelang (MATABE) di Kabupaten Mamuju; dan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

f. Kawasan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi Pulau Karampuang dan Pulau Balabalakang di Kabupaten Mamuju serta Pulau Lerelerekang di Kabupaten Majene.

Lebih lanjut seperti dijelaskan salah satu informan bahwa, konversi lahan pada dasarnya terjadi akibat adanya persaingan dalam pemanfaatan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian. Persaingan dalam pemanfaatan lahan tersebut muncul akibat adanya tiga fenomena ekonomi dan sosial, yaitu: (1) keterbatasan sumberdaya lahan; (2) pertumbuhan penduduk dan (3) pertumbuhan ekonomi. Luas lahan yang tersedia relatif terbatas, sehingga pertumbuhan penduduk akan menyebabkan peningkatan kebutuhan terhadap laban untuk kegiatan pertanian dan non pertanian. Sementara itu pertumbuhan ekonomi akan mendorong permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian lebih tinggi dibanding permintaan lahan untuk kegiatan pertanian karena permintaan produk non pertanian cenderung elastis terhadap pendapatan. Meningkatnya kelangkaan lahan akibat pertumbuhan penduduk, dibarengi dengan meningkatnya permintaan lahan untuk kegiatan non pertanian akibat pertumbuhan ekonomi, akhirnya menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian.

Hal ini diperkuat oleh lain bahwa, dampak konversi lahan dari aspek sosial ekonomi adalah kehilangan produksi pertanian dan nilai tambahnya, berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian, hilangnya kesempatan kerja pertanian dan pendapatan kerja yang dihasilkannya, irigasi yang dibangun dengan biaya besar tidak difungsikan dengan semestinya, timbulnya pencemaran dan degradasi lingkungan, dan hancurnya beberapa kelembagaan lokal yang

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

selama ini menunjang pembangunan pertanian. Sementara itu, manfaat ekonomi yang diperoleh tidak memadai khususnya bagi masyarakat.

Pertanian berkelanjutan adalah upaya memanfaatkan dan menggunakan sumberdaya untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan dan papan, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan serta melestarikannya. Definisi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: mantap secara ekologis, berkelanjuta secara ekonomis, adil, manusiawi dan luwes.

Tabel : Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Sulawesi Barat

No	Kabupaten	LP2B dalam RTRW Provinsi (Ha)	LP2B dalam RTWR Kabupaten (Ha)	Luas Lahan Sawah menurut Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat	Luas Sawah menurut BPS (Ha)	Keterangan
1	Mamuju	4,745	-	17,745	15,395	Pemerintah Kabupaten Mamuju belum menetapkan Kawasan LP2B, Berupa Angka, belum spasial
2	Majene	-	4,187	4,119	1,620	Berupa Angka, belum spasial
3	Polewali Mandar	2,265	15,870	20,972	18,546	Berupa Angka, belum spasial
4	Mamasa	-	11,251	14,997	12,876	Berupa Angka, belum spasial
5	Pasangkayu	1,200	5,000	6,219	4,437	Berupa Angka, belum spasial
6	mamuju Tengah	1,880	9,557	15,119	11,189	Berupa Angka, belum spasial
Jumlah		10,090	45,865	79,171	64,063	

Sumber: diolah dari berbagai data dan sumber

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan bahwa rujukan dalam tata kelola pertanian sangat beragam dan mempunyai bias perbedaan yang signifikan. Hal tersebut semestinya tidak terjadi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur Perda-perda tersebut telah ada sejak pembentukan proses penyusunan perda masing. Terlebih lagi, ketetapan-ketetapan yang telah disepakati tersebut tidak ditunjang dengan akurasi data secara spasial, hanya berupa angka-angka yang menunjuk lokasi pada masing-masing wilayah. Secara utuh tidak akan ditemukan dimana lokasi-lokasi tersebut.

Berdasarkan keterangan informan dari Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

> *"Terkait perbedaan data karena motode pengambilan data masing-masing institusi yang berbeda namun yang belum dapat dimengerti oleh pihak OPD terkait, khususnya Dinas Pertanian, bahwa sumber data utama adalah OPD terkait dan hal itu diakui oleh statistic sebagai wali data di Indonesia"... "Sedangakan terkait upaya untuk menyeragamkan data telah ditempuh melalui konferensi press/press release bersama dengan berbagai institusi terkait".*

Diperkuat dengan keterangan informan dari BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat menyatakan sebagai berikut:

> *"Terdapat angka-angka yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam RTRW setiap kabupaten kecuali Kabupaten mamuju yang memang belum menetapkan RTRW. Ketidaksesuain data tersebut akan dikaji kembali mengingat telah ada peraturan lain yang mengatur hal tersebut. Khusus sector pertanian, akan dilakukan updating data menggunakan data yang paling mutakhir, termasuk updating kawasan hutan dan kawasan penggunaan laiinya yang telah dilengkapi dengan ijin dari pemerintah. Hal yang sangat penting adalah perubahan pola ruang/peruntukan lahan karena usaha tani saat ini juga telah dipengaruhi oleh trend dan pola hidup masyarakat, sehingga evaluasi terhadap RTRW saat awal pembentukan bisa saja sangat bias jika dibandingkan dengan trend hari ini".*

Upaya penetapan kawasan adalah bentuk dari kesungguhan sebuah tata kelola dalam memproteksi peruntukan dan fungsi dalam interkoneksi tata ruang. Jika mengacu pada pernyataan tersebut maka tata kelola pertanian di Sulawesi Barat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

belum mampu memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan bidup masyarakatnya, sehingga desain pemenuhan kebutuhan tetap mengandalkan suplay dari pasar regional, belum mengandalkan kemampuan daerah, kendatipun sumberdaya alam mendukung.

1) Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Sulawesi Barat terdiri atas 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar (Pol-Man) Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu (dulunya dikenal dengan Mamuju Utara – Matra) dan Kabupaten Mamuju Tengah. Hingga saat Tesis ini disusun, hanya Kabupaten Mamuju yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada table berikut dapat dilihat rekapitulasi PERDA RTRW masing-masing Kabupaten.

Tabel 3. Daftar Perda RTRW Kabupaten se Sulawesi Barat.

No	Kabupaten	Peraturan Daerah	Keterangan
1	Mamuju	Belum ada (Persetujuan Substansi Menteri Nomor: HK.0103-Dr/690 tanggal 20 Desember 2011)	Sedang dalam pembahasan
2	Majene	Perda Nomor 12 Tahun 2012	
3	Polewali Mandar	Perda Nomor 2 Tahun 2013	
4	Mamasa	Perda Nomor 1 Tahun 2015	
5	Pasangkayu	Perda Nomor 1 Tahun 2014	
6	Mamuju Tengah	Perda Nomor 3 Tahun 2017	

Dalam RTRW tersebut, setiap kabuten telah mempunyai Perda RTRW, telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam bentuk angka-angka dan menunjuk lokasi, kendatipun belum ter-plot secara spasial. Sesuai dengan amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) merupakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kabupaten; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Oleh karena itu, RTRWK disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kecamatan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana alam di wilayah kabupaten, dampak pemanasan global, penanganan kawasan perbatasan antar kabupaten, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan kabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRWK. Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

RTRWK memadukan, menyerasikan tata guna lahan, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan tingkat perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan karakteristik wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan social serta budaya adat istiadat. Penyusunan RTRWK untuk mewujudkan tujuan tata ruang wilayah kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan terintegrasi dengan ruang kawasan lainnya serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.

Struktur ruang wilayah kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Mamasa, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air di wilayah Kabupaten Mamasa. Pola ruang wilayah kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis kabupaten.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWK ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahun; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi. Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis kabuapeten sangat berkaitan erat dengan RTRWK karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah untuk

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengoperasionalkannya. Oleh karena itu penetapan Peraturan Daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis kabupapten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

C. Faktor Penghambat dan Penunjang dalam Tata Kelola Lahan Pertanian

Implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Barat tidak berjalan mulus melainkan menghadapi berbagai faktor penghambat, di samping beberapa faktor pendukung. Demikian hal dalam penelitian ini faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pemerintah terhadap tata kelola area lahan pertanian dibatasi pada faktor ekonomi dan demografi. Pada hakekatnya pemanfaatan lahan adalah untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin timbul dalam perencanaan suatu lahan adalah permasalalah kesesuaian/ kecocokan lahan terhadap suatu peruntukan tertentu.

1. Faktor Pengambat

Sebagaimana dijelaskan bahwa faktor sosial ekonomi sebagai faktor yang menghambat sekaligus mendukung terdiri atas:

a. Perkembangan Penduduk, tingginya aktifitas suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perkembangan jumlah penduduk, akibat alamiah (jumlah kelahiran), arus masuk (pergerakan / perpindahan penduduk) *in migration*.
b. Aktifitas ekonomi, industry, perkantoran membutuhkan lahan sesuai dengan besaran aktifitas tersebut, dan mempengaruhi tata guna lahan disekitarnya.

Istilah penataan lahan, berbeda dengan istilah penutup lahan. Penataan lahan biasanya meliputi segala jenis kenampakan dan sudah dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan, sedangkan penutup lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi yang ada pada

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

lahan tertentu. Penataan lahan merupakan aspek penting karena penatan lahan mencerminkan tingkat peradaban manusia yang menghuninya.

Hasil wawancara dengan salah satu informan (Staf Dinas Pertanian) Sulbar menjelaskan bahwa, selain penjelasan di atas juga memiliki pendapat mengenai penutup lahan, yaitu penutup lahan adalah wujud fisik (visual) dari benda alam, vegetasi dan unsur-unsur budaya yang ada di permukaan bumi dengan tidak memperhatikan kegiatan manusia terhadap obyek tersebut. Barret dan Curtis, tahun 1982, mengatakan bahwa permukaan bumi sebagian terdiri dari kenampakan alamiah (penutupan lahan) seperti bangunan, vegetasi, dan lain sebagainya. Dan sebagian lagi berupa penampakan hasil aktivitas manusia termasuk kegiatan social ekonomi (penggunaan lahan).

Suatu unit penggunaan lahan mewakili tidak lebih dari suatu mental *construct* yang didesain untuk memudahkan inventarisasi dan aktivitas pemetaan. Oleh karena itu, interpretasi penggunaan lahan dari foto udara ini dimaksudkan untuk memudahkan deliniasi. Untuk mempercepat hasil inventarisasi dengan hasil yang cukup baik, digunakan pemanfaatan data penginderaan jauh, karena dari data penginderaan jauh memungkinkan diperoleh informasi tentang penggunaan lahan secara rinci. Selain itu, adanya perubahan pemanfaatan lahan dapat dimonitor menggunakan penginderaan jauh. Identifikasi, pemantauan, dan evaluasi penataan lahan perlu dilakukan pada setiap periode tertentu, sebagai dasar untuk penelitian yang mendalam mengenai perilaku manusia dalam memanfaatkan lahan.

Deugan demikian, penataan lahan menjadi bagian yang penting dalam usaha melakukan perencanaan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

keruangan di suatu wilayah. Prinsip penerapan kebijakan terhadap lahan perkotaan bertujuan untuk semakin mengoptimalkan penggunaan lahan dan pengadaan lahan dalam rangka menampung berbagai aktivitas perkotaan. Dalam kaitannya dengan upaya optimalisasi penggunaan lahan, kebijakan tata kelola lahan diartikan sebagai rangkaian aktifitas serta tindakan yang sitematis dan terorganisir dalam penyediaan lahan, tepat pada waktunya, untuk peruntukan pemanfaatan dan tujuan lainnya berdasarkan kepentingan masyarakat.

Kesesuaian suatu lahan sangat ditentukan oleh faktor lingkungannya seperti faktor kelerengan, iklim, jenis tanah dan batuan, tutupan lahan, satwa liar, hidrologi dan lain sebagainya. Hal yang terpenting dalam suatu perencanaan tataguna lahan adalah usulan lokasi serta tujuan peruntukannya. Terkait dengan hal tersebut ada beberapa tahap, antara lain :

1) Tahap pertama, melakukan survei pendahuluan atas data dasar yang meliputi studi pustaka, survey lapangan, serta pekerjaan laboratorium guna menyusun dan memadukan data dasar kedalam peta skala 1 : 25.000.
2) Tahap kedua, adalah melakukan penilaian kapabilitas lahan.
3) Tahap ketiga, menyiapkan rencana lokasi dan tujuan dari peruntukan lahan.

Data yang harus disiapkan pada tahap persiapan dan inventarisasi terdiri atas tiga bagian, yaitu faktor lingkungan Alamiah terdiri atas:

1) Topografi adalah bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya), dan asteroid.
2) Iklim atau keadaan rata-rata cuaca berdasarkan suatu waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Pengaruh posisi relatif matahari terhadap suatu tempat di bumi menyebabkan terjadinya musim, suatu penciri

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang membedakan iklim satu wilayah ruang dengan wilayah ruang yang lain. Perbedaan iklim menghasilkan beberapa sistem klasifikasi iklim.

3) Bencana alam, suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar dan wabah penyakit.

4) Tanah sebahagian besar berupa mineral dan partikel alam sebagai kumpulan tubuh alam yang menempati sebagian besar wilayah daratan bumi, mampu menumbuhkan aneka tumbuhan dan sebagai media bagi mahluk hidup lainnya melangsungkan aktifitas kehidupannya.

5) Drainase merupakan saluran air yang terdapat di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk melalui proses alami maupun dibuat secara sengaja oleh manusia. drainase dapat berada di permukaan tanah di bawah tanah. Drainase berfungsi mengatur alur suplai air demi pencegahan banjir dan masalah akibat tingginya debit air pada suatu waktu.

6) Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai berfungsi sebagai batas antara daratan dan perairan laut.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola lahan pertanian meliputi :

a. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

manusia atau mesin. Transportasi bermanfaat memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas harian. Di negara maju, mereka biasanya menggunakan transportasi yang lebih maju seperti kereta bawah tanah (*subway*) dan taksi. Penduduk di wilayah tersebut jarang yang miliki kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar lebih menggunakan angkutan umum sebagai sarana transportasi mereka. Transportasi dibagi menjadi 3 segmen yaitu darat, laut, dan udara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan anggaran yang lebih banyak untuk pemanfaatan dan penggunaannya. Selain karena memiliki teknologi yang lebih canggih, transportasi udara merupakan alat transportasi tercepat dan ter-aman dibandingkan dengan alat transportasi lainnya.

b. Kebutuhan terhadap penggunaan lahan dalam yang terdapat pada struktur tata ruang wilayah berkaitan dengan 3 sistem, yaitu :
   1) Sistem kegiatan, manusia dan struktur kelembagaannya untuk memenuhi kebutuhannya senantiasa berinteraksi dalam waktu dan ruang.
   2) Sistem pengembangan lahan yang berfokus untuk kebutuhan bidup manusia dalam seluruh aktivitas kehidupan.
   3) Sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi abiotik dan biotik dengan air, udara dan tanah.

c. Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah oleh suatu masyarakat adat yang kemudian disebut dengan tanah komunal (tanah milik bersama). Dalam hubungan dengan pemilikan tanah ini di dalam UUPA diartikan penguasaan atas tanah yang didasarkan pada suatu hak dengan status hak milik, maka Pasal 20 UUPA, ditentukan bahwa:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) Hak milik adalah hak atas manusia terhadap tanah yang dikuasai turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah/kuasa, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA.
2) Hak milik dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain.

Demikian dapat dipahami bahwa, penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. Oleh karena itu, disamping sebagai faktor penting dalam perencanaan, pada dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan penggunaan lahan. Kenampakan penataan lahan berubah berdasarkan waktu, yakni keadaan kenampakan penataan lahan atau posisinya berubah pada kurun waktu tertentu. Perubahan penataan lahan dapat terjadi secara sistematik dan non-sistematik. Perubahan sistematik ditandai oleh adanya fenomena yang berulang, yakni tipe perubahan penggunaan lahan pada setiap lokasi yang sama. Kecenderungan perubahan ini dapat ditunjukkan melalui peta multi waktu. Fenomena tersebut dapat dipetakan berdasarkan karakteristik dan seri waktu, sehingga perubahan penggunaan lahan dapat diketahui riwayatnya.

Perubahan non-sistematik terjadi karena kenampakan luasan lahan yang mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. Perubahan ini pada umumnya tidak linear karena kenampakannya berubah-ubah, baik penutup lahan maupun lokasinya. Penataan lahan mencerminkan sejauh mana usaha atau campur tangan manusia dalam memanfaatkan dan mengelola lingkungannya. Untuk dapat melakukan interpretasi terhadap penataan lahan secara sederhana dan agar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

hasilnya mudah dipahami oleh orang lain (pengguna), diperlukan panduan kerja berupa sistem klasifikasi penataan lahan yang berbeda bagi setiap daerah/wilayah.

Klasifikasi penataan lahan menjadi pedoman atau acuan dalam proses interpretasi terhadap data hasil pemetaan penatan lahan menggunakan citra penginderaan jauh. Tujuan klasifikasi supaya data yang dibuat informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Sedangkan para ahli berpendapat Penatan lahan yaitu segala macam campur tangan manusia, baik secara menetap maupun berpindah-pindah terhadap suatu kelompok sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual, ataupun kedua-duanya.

Pengelompokan objek-objek ke dalam kelas-kelas berdasarkan persamaan dalam sifatnya, atau kaitan antara objek-objek tersebut disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi adalah penetapan objek-objek kenampakan atau unit-unit menjadi kumpulan-kumpulan di dalam suatu sistem pengelompokan yang dibedakan berdasarkan sifat-sifat yang khusus berdasarkan kandungan isinya. Klasifikasi penataan lahan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses interpretasi terhadap lahan, apabila data pemetaan penggunaan lahan menggunakan citra penginderaan jauh.

Tujuan klasifikasi supaya data yang dibuat informasi yang sederhana dan mudah dipahami. Keterkaitan perencanaan Penggunaan lahan dengan perencanaan pembangunan daerah sangat erat. Perencanaan tata guna lahan dapat memberikan sumbangan/peran yang cukup penting dengan perencanaan pembangunan daerah, dengan memberikan informasi dan data yang akurat

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tentang kondisi lahan, tanah, lingkungan dengan berbagai karakter dan keragamannya. Hal ini membantu untuk menentukan dan mengembangkan alternatif pembangunan yang sesuai dengan keadaan lahan maupun kebutuhan masyarakatnya.

Keterkaitan perencanaan tata guna lahan dengan proses-proses perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

a) Proses perencanaan pembangunan daerah sangat dengan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan.

b) Perencanaan tata guna lahan merupakan jembatan antara perencanaan daerah dengan pengembangan wilayah.

c) Perumusan perencanaan tata guna lahan merupakan kerangka acuan bagi pembangunan dan pengembangan prasarana fisik yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, khususnya yang terkait dengan penggunaan lahan.

d) Perencanaan tata guna lahan dapat memberikan informasi untuk menentukan pilihan-pilihan mengenai penggunaan lahan yang layak guna dikembangkan atau dipertahankan atau dialih-fungsikan, dengan selalu mempertimbangkan efek-efek yang akan timbul dan mempengaruhi kualitas lingkungan/ ekosistem.

Tingkat relevansi dan urgensi perencanaan tata guna lahan terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD), sangat tinggi karena PPD sebagai upaya untuk merumuskan konsep-konsep pengembangan dan pembangunan bagi suatu daerah terkait secara langsung dengan masalah pertanahan di daerah. Pembangunan daerah akan selalu berkaitan dengan masalah penggunaan lahan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dan lahan merupakan salah satu kebutuhan utama yang memiliki dampak langsung terhadap siklus kehidupan, tidak hanya bagi komunitas manusia, tetapi komunitas secara umum.

Beberapa faktor pendukung agar diperoleh perencanaan tata guna lahan yang benar-benar memberikan informasi yang akurat dan relevan, diantaranya:

(1) Keadaan mengenai kondisi persebaran penduduk dan berbagai kecenderungan serta implikasinya di daerah perencanaan.

(2) Keadaan topografi daerah perencanaan.

(3) Faktor iklim dan cuaca.

(4) Ciri-ciri kondisi dan kontur tanah yang ada di daerah tersebut.

(5) Penggunaan dan pemanfaatan lahan selama ini serta kemungkinan-kemungkinan pengembangannya sesuai dengan klasifikasi tanah yang ada.

(6) Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan potensi daerah tersebut, baik dilihat dari aspek pengadaan bahan baku, tenaga/SDM, atau aspek pemasarannya.

(7) Kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, khususnya yang terkait langsung dengan masalah pertanahan dan pembangunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mencermati hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat, dalam penelitian ini meliputi :
   a. Sulawesi Barat terdiri atas 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota Provinsi, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Hingga kini hanya Kabupaten Mamuju yang belum menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
   b. Kualitas dan kemampuan lahan diperbaiki melalui optimasi pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan perencanaan pemanfaatan lahan secara seksama. Prinsip penentuan kemampuan lahan untuk suatu pemanfaatan, dilakukan dengan mempertimbangan berbagai aspek, diantaranya aspek fisik, untuk menghindari munculnya dampak negatif dari pemanfaatan yang tidak optimal.
   c. Perencanaan tata guna lahan karena pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan Perencanaan penggunaan lahan. Dalam berbagai literatur, kedua istilah ini disebut *land use planning*. Sedikit perbedaan keduanya hanya terletak pada penekanan pada ruang (*space*).

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Faktor penghambat dan penunjang dalam tata kelola area lahan pertanian dalam penelitian ini meliputi ekonomi dan demografi sebagai penghambat dan faktor pendidikan dan sokial politik sebagai pendukung.
   a. Faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola lahan pertanian terutama aspek ekonomi dan demografi menjadi bagian yang menghambat dalam usaha melakukan perencanaan dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keruangan di suatu wilayah. Prinsip kebijakan terhadap lahan perkotaan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan pengadaan lahan untuk menampung berbagai aktivitas perkotaan.
   b. Faktor pendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola lahan pertanian terutama pendidikan dan sosial politik digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini karena aspek pendidikan dan sosial politik merupakan sumber daya yang dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di semua sektor kehidupan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sebagai permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat belum dilakukan secara baik oleh pihak-pihak yang berwenang, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten Mamuju belum menetapkan RTRW sebagai salah satu acuan pengembangan pertanian. Selain itu, diharapkan penetapan kawasan pertanian dimasing-masing wilayah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kabupaten masih berupa angka-angka semata tanpa didukung data spasial yang akan menyebabkan pergeseran-pergeseran kawasan. Pergeseran kawasan akan menyulitkan dalam pembentukan dan pembangunan infrastruktur pendukung.

2. Jika mengacu pada proyeksi pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan pertanian beserta provitas komoditi pangan, Sulawesi Barat dapat memenuhi kebutuhan pangan strategis dalam rentan waktu RPJP. Oleh karena itu disarankan agar tata kelola lahan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat menjadi penyebab tergerusnya kawasan pertanian karena alih fungsi lahan.
3. Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar melakukan revisi dan koreksi terhadap RTRW khususnya dalam penentuan luasan kawasan pada masing-masing wilayah kabupaten dan menjadikan RTRW revisi tersebut sebagai rujukan pokok Tata Kelola pengembangan kawasan secara umum.
4. Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju agar menetapkan RTRW sebagai bagian dari Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Kondisi berlarut-larut tanpa pedoman perencanaan tata kelola wilayah akan membuat kegiatan pembangunan tidak terkoneksi secara baik.
5. Agar pihak-pihak yang berwenang meng-*ekspose* data khususnya BPS dan Pemerintah Daerah lingkup Sulawesi Barat, menghindari terjadinya perbedaan mendasar dan substansi yang dapat menyebabkan kebingungan bagi pengguna ataupun pembaca data tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Agustian, A. & Nurmanaf. A. R. (2001). Kontribusi usahatani ternak ruminansia kecil terhadap pendapatan rumah tangga dan prospek pengembangannya dalam memanfaatkan peluang pasar pada masa mendatang (Kajian di Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara). *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*. Bogor. Halaman 7 – 16.

Campbell, J. Y. (1996). Understanding Risk and Return. *Journal of Political Economy 104(2)*, p. 298 – 345.

Irawan, B. (2005). Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian*. Bogor. Halaman 21 – 35.

Justice, C. O., Townshend, R. G., Holben, B. N., & Tucker C. J., (1985). Analysis of Phenology of Global Vegetation Using Meteorological Satellite Data. *International Journal of remote Sensing*. p. 111 – 146.

Mulyani, A. & Noor, M. (2011). Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Pertanian di Lahan Gambut: Lahan Pertanian Mendukung Pengembangan Komoditi Pangan. *Balai Penelitian Tanah*. Bogor. Halaman 27 – 44.

Wahid, A. (2009). Identifikasi Penyimpangan Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal SMARTek*, Vol. 7, No. 2, Halaman 99 – 112.

Buku

Chapin, F. Stuart, Jr. & Kaisar, E. J. (1979). *Urban Land use Plannig*, University of Illinois Press.

Dwiyanto, A. (2009). *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik; Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jogjakarta: Gaya Media.

Hadi, A. (2005). *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*. Jakarta: Grainedia Pustaka Utama.

Ibrahim, A. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Khisty, J. & Kent, B. L. (2003). *Dasar Dasar Rekayasa Transportasi Jilid 1.* Jakarta: Erlangga.

Khisty, J. & Kent, B. L. (2003). *Dasar – Dasar Rekayasa Transportasi Jilid 2.* Jakarta: Erlangga.

Mubyarto, (1989). *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta : LP3S, Edisi Ke-tiga.

Moleong, J. L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mazmanian, D. A. & Paul A. S. (1983). *Implementation and Public Policy*, USA: Scott Foresman and Company.

Nakamura, R. T. & Frank S. (1980). *The Politics of Policy Implementation*, New York: St. Martin Press.

Purwowidodo. (1983). *Teknologi Mulsa*. Jakarta: Dewaruci Press.

Poltak, L. S. dkk. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, dan Impelmentasinya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Pasaribu, (2007). *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Suryatna, R. (1985). *Ilmu Tanah*, Bandung: Angkasa.

Suradinata, E. (1993). *Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan*, Bandung: Mandar Maju.

Sitorus, S. R. P. (2005). *Evaluasi Sumberdaya Lahan*. Bandung: Tarsito.

Sugiyono, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Surjadi, H. (2009). *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.

Todaro, M. (2006). *Pengembangan Ekonomi Dunia Ketiga. Edisi Kedelapan.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Winardi, (1990). *Asas-Asas Manajemen*, Bandung: Mandar Maju.

Wahab, A. (2001). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Akasara.

Wibawa, S. (2002). *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Buku, Kelompok Penulis, dan Institusi Pemerintah sebagai Penerbit

Arsyad, S. dkk. (1989). *Konservasi Tanah dan Air*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Hamdi, M. dkk. (2014). *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi*. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka.

Nugraha. S., (2007). Kesesuaian Fungsi Kawasan dengan Pemanfaatan Lahan di DAS Samin. (Skripsi). Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.

Sulaeman, A. (1998). Diktat Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad – IIP.

Statistik Data Lahan Pertanian Tahun 2010 - 2014, (2015). Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian, Jakarta.

Buku dengan Editor

Rustiadi, E. & Reti. W. (2008). Urgensi Lahan Pertanian Pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan. dalam Arsyad, S. & Rustiadi, E. (Ed). 267 Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan, Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.

Sabiham, S. (2008). "Manajemen Sumberdaya Lahan dan Usaha Pertanian Berkelanjutan". dalam Arsyad, S. & Rustiadi, E. (Ed). Penyelamatan Tanah, Air dan Lingkungan. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia. p. 3-16

Dokumen dari Internet

Ashyar, (2014). Prinsip Penggunaan Lahan Perencanaan Ekonomi. Diambil 22 Januari 2018, dari situs: http://jokowarino.id/prinsip-penggunaan-lahan-perencanaan/

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, (2017). Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka, Katalog/Catalog: 1102001.76, CV. Parahyangan. Diambil 11 Januari 2018 dari situs: http://bps.go.id

Shranghei, N. (2015). Proses Perencanaan Penggunaan Lahan. Diambil 22 Januari 2018 dari situs: http://nurulshranghei.blogspot.co.id/2015/05/proses-perencanaan-tata-guna-lahan.html.

Sulistiono. (2015). Tinjauan Pustaka Konsep Wilayah dan Pusat Pertumbuhan. Diambil 22 Januari 2018 dari situs: (http://www.damandiri.or.id/file/sulistionoipbbab2.pdf.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Makalah yang Presentasikan

Jamulya & Sunarto, (1991). Kemampuan Lahan. Evaluasi Sumberdaya Lahan. Yogyakarta: Fakultas Geografi. UGM.

Kaslan A. T. (1997). Seuntai Pengetahuan Usaha Tani Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Krishnamoorthy, (2015). Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Tangganur 2014. Lampung: Universitas Lampung.

Malingreau, J. P. (1978). Penggunaan Lahan Pedesaan Penafsiran Citra untuk Inventarisasi dan Analisisnya. Yogyakarta: Pusat Pendidikan Interpretasi Citra PJ dan Survey Terpadu UGM BAKO-SURANAL.

Nugroho, I. & Dahuri, R. (2004). Pembangunan Wilayah dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia.

Notohadiprawiro, T. (1991). Tanah dan lingkungan. Kursus AMDAL Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Simatupang, P. & Irawan, B. (2003). Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi. Proseding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian. Bogor 2 Oktober dan Jakarta 25 Oktober 2002.

Suryana, A. (2005). Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Andalan Pembangunan Nasional. Departemen Pertanian: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,.

Pranoto, (2009). Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruaug Kota. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang. Departemen Pekerjaan Umum.

Skripsi / Tesis yang di Publikasikan

Handari, M. F. A. W. (2012). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang, Semarang: Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.

Nasriaty, N. (2016). Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kabupaten Mamuju Utara. Palu: Tesis Program Pasca Sarjana, Magister Administrasi Publik Universitas Tadulako.

Murcharke, (1990). Perubahan Tutupan Lahan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Bandung Utara. Bogor: Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Priyandono, P. S. (2001). Pengaruh Perkembangan Kawasan Industri "SIER" Terhadap Perubahan Guna Lahan Kawasan Sekitarnya. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Suryantoro, (2002). Penggunaan Lahan dengan Foto Udara di Kota Yogyakarta. (Disertasi). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabuapten Majene Tahun 2011 - 2031.

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatean Polewali Mandar Tahun 2012 - 2032.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 - Tahun 2034.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamasa Tahun 2015 - 2035.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 - 2037.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Uudang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA LAHAN DI SULAWESI BARAT

DAFTAR PERTANYAAN:

A. PEMERINTAH

1. Bagaimana peran OPD dalam tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat?
2. Apakah tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat telah memenuhi proporsi peruntukan luasan wilayah untuk masing-masing bidang pemanfaatannya?
3. Mengapa terdapat perbedaan data yang dikeluarkan masing-masing otoritas? Dan apakah ada upaya untuk menyeragamkan data!
4. Terkait RTRW Kabupaten Mamuju yang belum ditetapkan, bagaimanakah dampaknya terhadap tata kelola wilayah khususnya pertanian di Sulawesi Barat!
5. Apakah akan dilakukan review terhadap RTRW karena menurut aturan, hal tersebut dimungkinkan!

B. MASYARAKAT

1. Bagaimana tanggapan terhadap tata kelola lahan pertanian yang di lakukan oleh pemerintah?
2. Apakah ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat
3. Bagaimana tentang kepemilikan lahan dan penguasaan lahan di Sulawesi Barat?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM TATA KELOLA LAHAN DI SULAWESI BARAT

Narasumber	Pertanyaan dan Tanggapan
Kepala Dinas Pertanian Sulawesi Barat	1. Bagaimana peran OPD dalam tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat? *"Berdasarkan tugas dan fungsi OPD, maka Dinas Pertanian adalah ujung tombak sumber informasi pengambilan kebijakan pimpinan daerah dalam memutuskan kebijakan terkait tata kelola lahan pertanian".* 2. Apakah tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat telah memenuhi proporsi peruntukan luasan wilayah untuk masing-masing bidang pemanfaatannya? *"Berdasarkan PERDA RTRW No. 1 Tahun 2014, proporsi peruntukan lahan telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan dan karakteristik lahan, kawasan perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura, bahkan dilengkapi dengan peta pengembangan infrastruktur untuk menunjang aktifitas pertanian di Sulawesi Barat".* 3. Mengapa terdapat perbedaan data yang dikeluarkan masing-masing otoritas? Dan apakah ada upaya untuk menyeragamkan data! *"Terkait perbedaan data karena motode pengambilan data masing-masing institusi yang berbeda namun yang belum dapat dimengerti oleh pihak OPD terkait, khususnya Dinas Pertanian, bahwa sumber data utama adalah OPD terkait dan hal itu diakui oleh statistic sebagai wali data di Indonesia"* *"Sedangakan terkait upaya untuk menyeragamkan data telah ditempuh melalui konferensi press/press release bersama dengan berbagai institusi terkait".*
Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	1. Apakah akan dilakukan review terhadap RTRW karena menurut aturan, hal tersebut dimungkinkan! *"dalam Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Khususnya Pasal 23 ayat 4. rencana tata ruang wilayah provinsi dapat ditinjau kembali satu kali dalam lima tahun. Merujuk hal tersebut maka pada tahun 2018, RTRW Sulawesi Barat telah memenuhi kriteria untuk dilakukan penjauan kembali".* 2. Dalam rencana revisi tersebut, apakah telah di temukan hal-hal yang urgen untuk dilakukan peninjauan kembali, khususnya

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	dalam hal kebijakan tata kelola lahan pertanian? *"terdapat angka-angka yang tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam RTRW setiap kabupaten kecuali Kabupaten mamuju yang memang belum menetapkan RTRW. Ketidaksesuain data tersebut akan dikaji kembali mengingat telah ada peraturan lain yang mengatur hal tersebut. Khusus sector pertanian, akan dilakukan updating data menggunakan data yang paling mutakhir, termasuk updating kawasan hutan dan kawasan penggunaan laiinya yang telah dilengkapi dengan ijin dari pemerintah. Hal yang sangat penting adalah perubahan pola ruang/peruntukan lahan karena usaha tani saat ini juga telah dipengaruhi oleh trend dan pola hidup masyarakat, sehingga evaluasi terhadap RTRW saat awal pembentukan bisa saja sangat bias jika dibandingkan dengan trend hari ini".*
Bappeda Kabupaten Mamuju	1. Terkait RTRW Kabupaten Mamuju yang belum ditetapkan, bagaimanakah dampaknya terhadap tata kelola wilayah khususnya pertanian di Sulawesi Barat! *"Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kabupaten Mamuju memiliki pertimbangan yang lebih kompleks dalam penyusunan RTRW jika dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten Lain dalam Wilayah Sulawesi Barat, Hal tersebut karena fungsi Mamuju, Khususnya Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro sebagai Pusat Pemerintahan tidak saja untuk Kabupaten Mamuju, namun juga bagi Provinsi Sulawesi Barat. Beban fungsi tersebut yang memerlukan pertimbangan khusus, saat ini telah ada persetujuan dari Kemeterian Dalam Negeri terkait hal tersebut dan proses legislasi di DPRD Kabupaten Mamuju telah menunjukkan kemajuan signifikan, sementara pihak Pemerintah Kabupaten senantiasa mendorong dengan fasilitasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam rangaka pembahasan tersebut, khususnya data dan Tenaga Ahli dari berbagai institusi yang memang memiliki kompetensi dalam pembahasan hal demikian".* 2. Apakah dalam Rancangan RTRW tersebut, porsi perencanaan penggunaan lahan khususnya pertanian mendapatkan perhatian yang cukup? *"Pertanian di Kabupaten Mamuju masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur PDRB, olehnya itu kemampuan wilayah yang ditunjang sumberdaya menjadi pertimbangan untuk tetap menjadikan wilayah-wilayah potensial untuk pengembangan pertanian, khususnya tanaman pangan".* 3. Dengan tidak adanya RTRW, apa yang menjadi acuan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam tata kelola lahan pertanian? *"RPJMD menjadi salah satu instrument yang penting menggantikan dokumen perencanaan lainnya khususnya RTRW karena dalam RPJMD yang sekaligus memuat visi dan misi Kepala Daerah periode saat ini. Dalam RPJMD, jelas bahwa pertanian di Kabupaten Mamuju memerlukan lahan yang optimal dan tidak diarahkan untuk melakukan kegiatan optimasi pada lahan yang marginal. Pemerintah Kabupaten mendorong agar kepemilikan lahan pada tingkat petani lebih diutamakan disamping mendorong agar komoditi-komoditi yang membutuhkan investor besar dapat bersinergi dengan masyarakat local melalui kebun-kebun plasma. Disektor pertanian tanaman pangan. Daerah-daerah utama penghasil beras akan ditunjang dengan infrastruktur khususnya pengairan sebagai prasayat utama swasembada beras untuk tingkat Kabupaten Mamuju".*
DPRD Kabupaten Mamuju (PANSUS RTRW)	1. Sejauhmana Rancangan PRDA RTW Kab. Mamuju saat ini di PANSUS? *"Konsultasi dengan institusi terkait telah dilaksanakan saat ini untuk yang ke tujuh kalinya dan Ranperda RTRW Mamuju masih dalam tahap pembahasan dan akan mempercepat penyelesian RTRW, sebab menjadi landasan untuk pengendalian pembangunan di Mamuju. Semua masih dalam pembahasan. Dan kita diundang oleh dua kementerian yakni PU dan ATR untuk melakukan sinkronisasi ranperda itu ke pusat. Dari 100 pasal sudah selesai kami bahas, 14 pasal diantaranya sudah dibahas, kami komitmen ditahun ini untuk ketuk palu. Selanjutnya, ranperda ini akan diasistensi di tingkat provinsi untuk penyesuaian, hingga ke kementrian. Tim Pansus juga dijadwalkan bakal mengunjungi Pontianak, Kalimantan Barat, dalam rangka studi banding".* 2. Pertimbangan apa saja yang dalam pembahasan RTRW Kabupaten Mamuju? *"Kemarin sempat terjadi polemik terkait data yang diusulkan oleh dinas terkait. Ada sekitar kurang lebih 16 ribu hektare dan dimana kita menilai itu adalah data yang ada sekarang, la juga menilai, jika data itu yang dimasukkan, maka tidak ada lagi penambahan pada tahun-tahun berikutnya. Karena Perda RTRW tersebut memiliki masa perencanaan sekitar 25 tahun. Kemudian masalah penetapan Perda RTRW yang terkesan*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	lama tersebut, ditanggapi karena adanya persoalan teknis menyangkut penentuan letak suatu daerah kawasan yang harus disesuaikan kebutuhan masyarakat dan kondisi Daerah Mamuju. Namun meskipun demikian pihaknya dan eksekutif akan tetap mendorong percepatan Perda RTRW yang seharusnya sudah ditetapkan pada tahun 2016 sesuai rencana awal".
Dinas Pertanian Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Mamuju	1. Seperti apa kebijakan tata kelola lahan pertanian di Kabupaten Mamuju yang belum di dukung dengan RTRW? *"Patron pembangunan sudah lumrah adalah RTRW sebagaiman amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Namun, pembangunan juga tidak dapat terhambat bahkan tidak terlaksana tanpa instrumen peraturan tersebut, sebagai leading sektor pembangunan pertanian di Kabupaten Mamuju, telah dibuat instrumen-instrumen seperti roadmap pembangunan pertanian atau rencana aksi. Dokumen tersebut menjadi cikal-bakal Rancangan Peraturan Daerah terkait RTRW dan ketika saatnya RTRW tersebut telah menjadi PERDA maka proses pembanguna pertanian di Kabupaten Mamuju telah berjalan pada koridor yang direncanakon".* 2. Kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam Tata Kelola Lahan Pertanian seperti apa? *"selama ini, pertanian di Mamuju telah terkondisikan secara alami, maksudnya adalah komoditi-komoditi pertanian (tanaman pangan dan perkebunan) berada pada lokasi-yang tersebar berdasarkan karakteristik lahan dan kebiasaan masyarakat petani. dengan kondisi tersebut, pemerintah mendorong agar usaha tani senantiasa berlangsung pada lahan-lahan yang mereka kuasai baik dalam bentuk hak milik, sewa maupun sebagai buruh tani. Tata kelola lahan yang diatur oleh pemerintah adalah berorientasi pada pengambangan kawasan agar lebih ekonomis dalam pengelolaannya".* 3. Bagaimana masyarakat petani di Kabupaten Mamuju menanggapi kebijkau-kebijakan pemerintah kabupaten tersebut? *"masyarakat petani di Mamuju adalah masyarakat agraris*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

	namun terkendala oleh sarana pendukung usaha tani, misalnya dikomoditi pangan yang sangat tergantung air maka kebijakan yang mendukung sektor pertanian menjadi perhatian utama masyarakat. Tata kelola lahan pertanian ditanggapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan kesempatan berusaha disektor pertanian pada wilayah-wilayah potensial pengembangan dan kinerja tersebut terlihat dalah struktur PDRB setiap tahunnya yang masih menjadi dominasi sektor tersebut".
Masyarakat	1. Bagaimana tanggapan terhadap tata kelola lahan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah? 2. Apakah ada pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan tata kelola lahan pertanian di Sulawesi Barat 3. Bagaimana tentang kepemilikan lahan dan penguasaan lahan di Sulawesi Barat? Masyarakat Petani (Mamuju) *"Pemerintah seharusnya lebih mem-fasilitasi lagi masyarakt kurang mampu untuk penguasaan lahan, dalam hal ini perbanyak kuota persil untuk program PRONA. Sebab kelengkopan tersebut dapat memberikan peluang yang lebih besar terhadap akses pembiayaan baik bank maupun lembaga finansial/pembiayaan lainnya".* Masyarakat Petani (Majene) *"Pemerintah sebaiknya memperhatikan dengan lebih saksama karakteristik wilayah, sebab hal tersebut terkait kultur pertanian yang telah terbangun. Ketidakmampuan merespon hal tersebut akan membuat tidak optimalnya hasil usaha tani".* Masyarakat Petani (Polman) *"Penetapan kawasan pertanian harus disertai dengan komitmen bersama khususnya pemilik-pemilik tanah. Tata kelola yang demikian menuntut peran serta masyarakat yang tentunya dikawal oleh pemerintah, karena jika tidak demikian maka bukan tidak mungkin rencana pembentukan kawasan tidak dapat tercapai".* Masyarakat Petani (Mamasa) *"Untuk daerah pegunungan seperti Mamasa, pemerintah harus mendukung pengembangan pertanian yang lebih khusus seperti kopi dan tanaman hortikultura. Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiringan yang relative lebih landai, pengembangan tanaman pangan dapat dimaksimalkan karena ketersediaan air yang cukup, hanya saja persoalannya adalah pengelolaan air tersebut haris maksimal. Karakteristik lahan*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

di Kabupaten Mamasa, secara umum sama sehingga potensi pengembangan pertanian juga sama namun pemerintah harus lebih tegas membuat penetapan kawasan komoditi, hal tersebut untuk mempermudah penyedian sara dan prasarana pendukung".

Masyarakat Petani (Mamuju Utara / Pasang Kayu)

"Ketika Kabupaten ini (Pasang Kayu) masih merupakan bagian dari Kabupaten Mamuju, arah pengembangan pertanian diarahkan untuk memanfaatkan lahan-lahan bekas pengelolaan hutan yang hak konsesinya telah berakhir, sehingga pada perkembangannya yang sangat potensial adalah komoditi perkebunan khususnya kelapa sawit. Kebijakan pemerintah yang memberikan porsi terhadap pengembangan tanaman pangan dan hortikultura adalah sebuah kebijakan yang baik karena komoditi tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok dan menunjang kehidupan masyarakat, dan agar Kabupaten Pasang Kayu tidak hanya bergantung pada hasil produksi dari kabupaten sekitarnya termasuk dari Sulawesi Tengah. Meskipun hal tersebut berat karena kultur masyarakat petani yang telah terbiasa dengan tanaman keras/tahunan, namun nilai ekonomis komoditi dapat menjadi harapan untuk pengembangan kedepan".

Masyarakat Petani (Mamuju Tengah)

"Kabupaten MamujuTengah mengkhususkan komoditi perkebunan sebagai unggulan, namun fluktuasi harga sawit yang cenderung mengikuti harga pasar internasional memberikan pertimbangan yang lain agar masyarakat petani mengusahakan komoditi lain yang memiliki nilai ekonomis yang lebih baik seperti beras. Pemerintah semestinya mendukung pertanian tanaman pangan tersebut dengan penyedian infrastruktur pendukung karena potensi yang dapat dimanfaatkan di daerah ini sangan banyak. Khusus kepemilikan/penguasaan lahan, harus mendapot perhatian yang seriuus dari pemerintah karena hal tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik dimasa-masa mendatang".

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

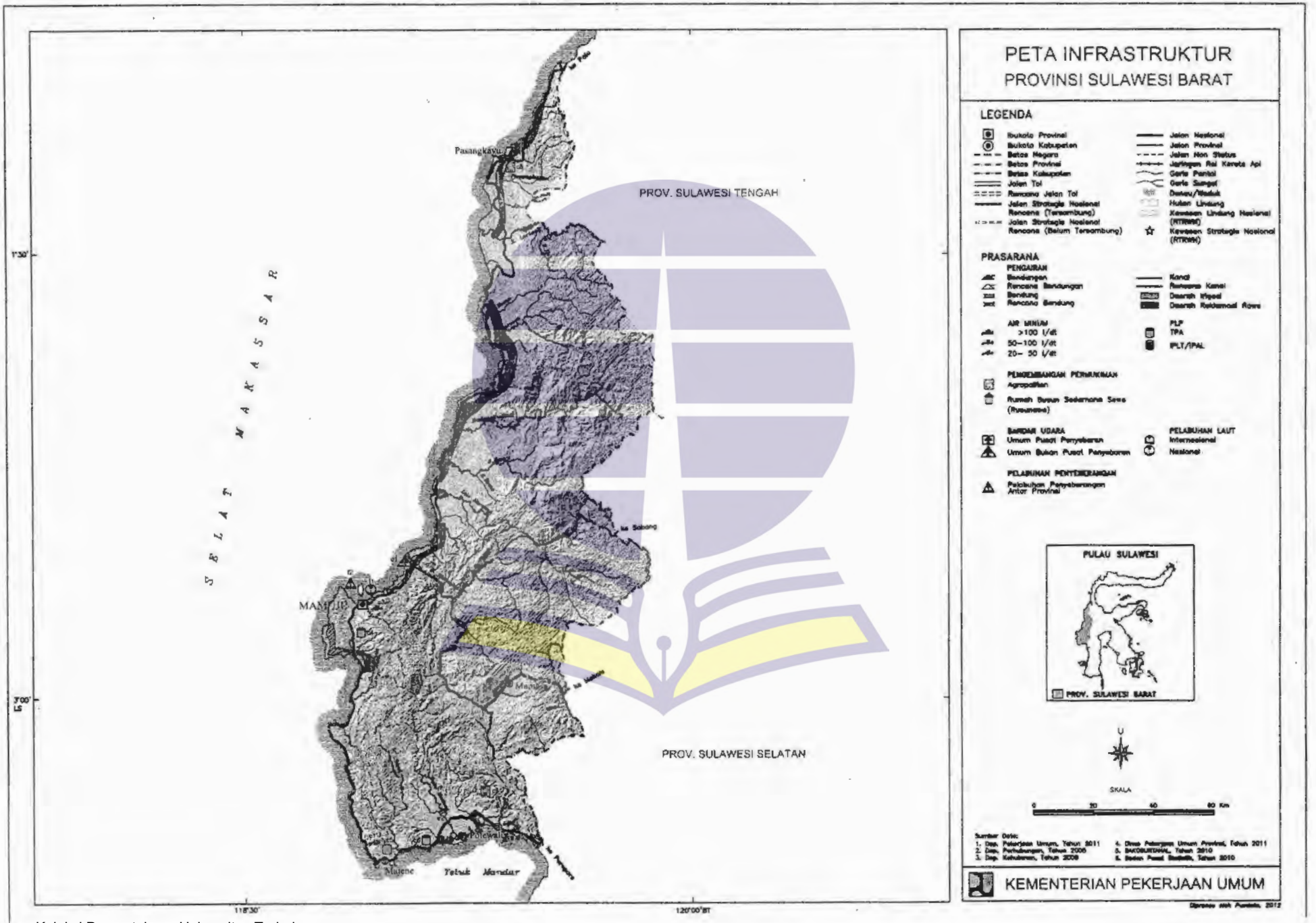

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

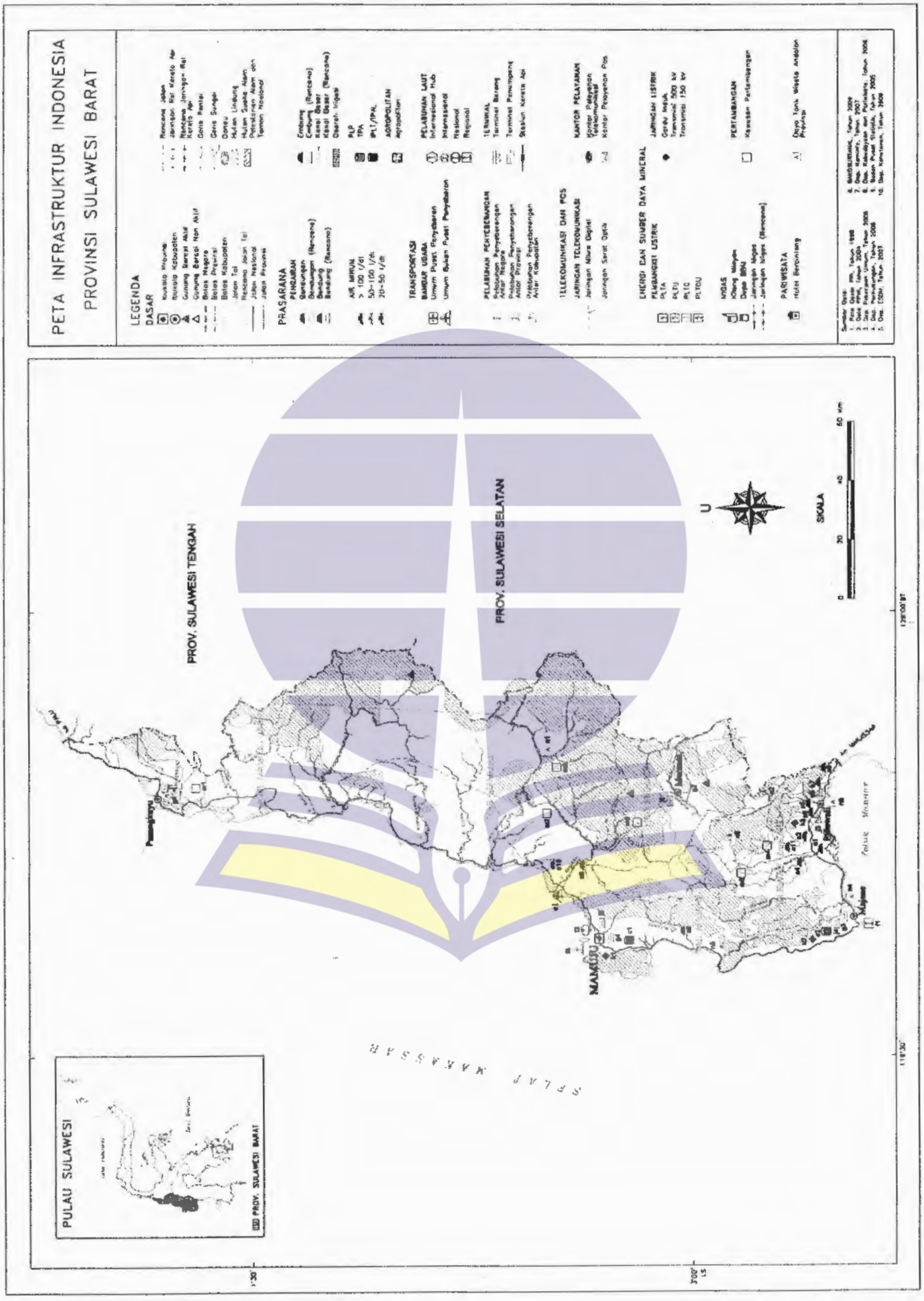

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

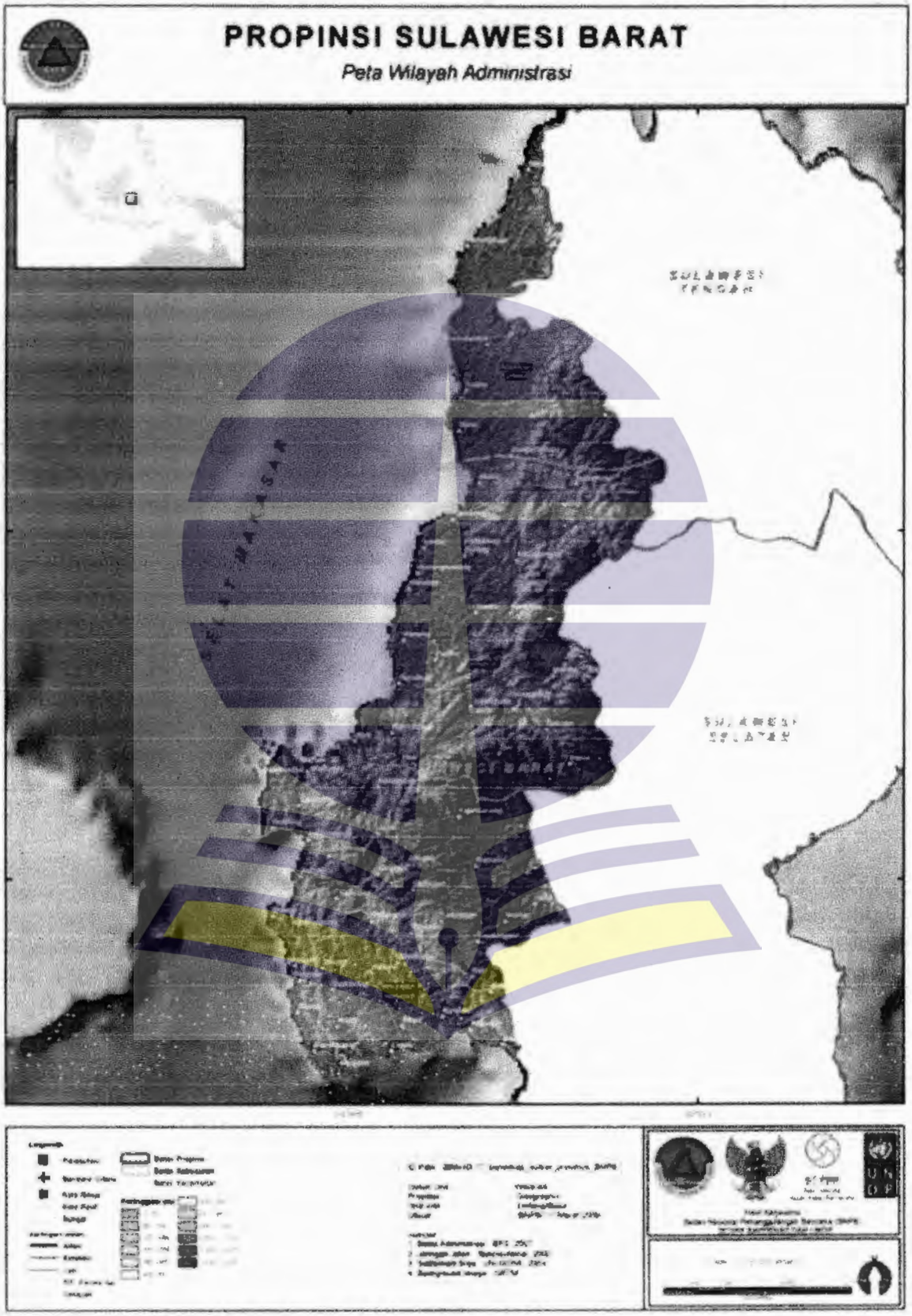

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PETA ZONA KERENTANAN GERAKAN TANAH PROVINSI SULAWESI BARAT

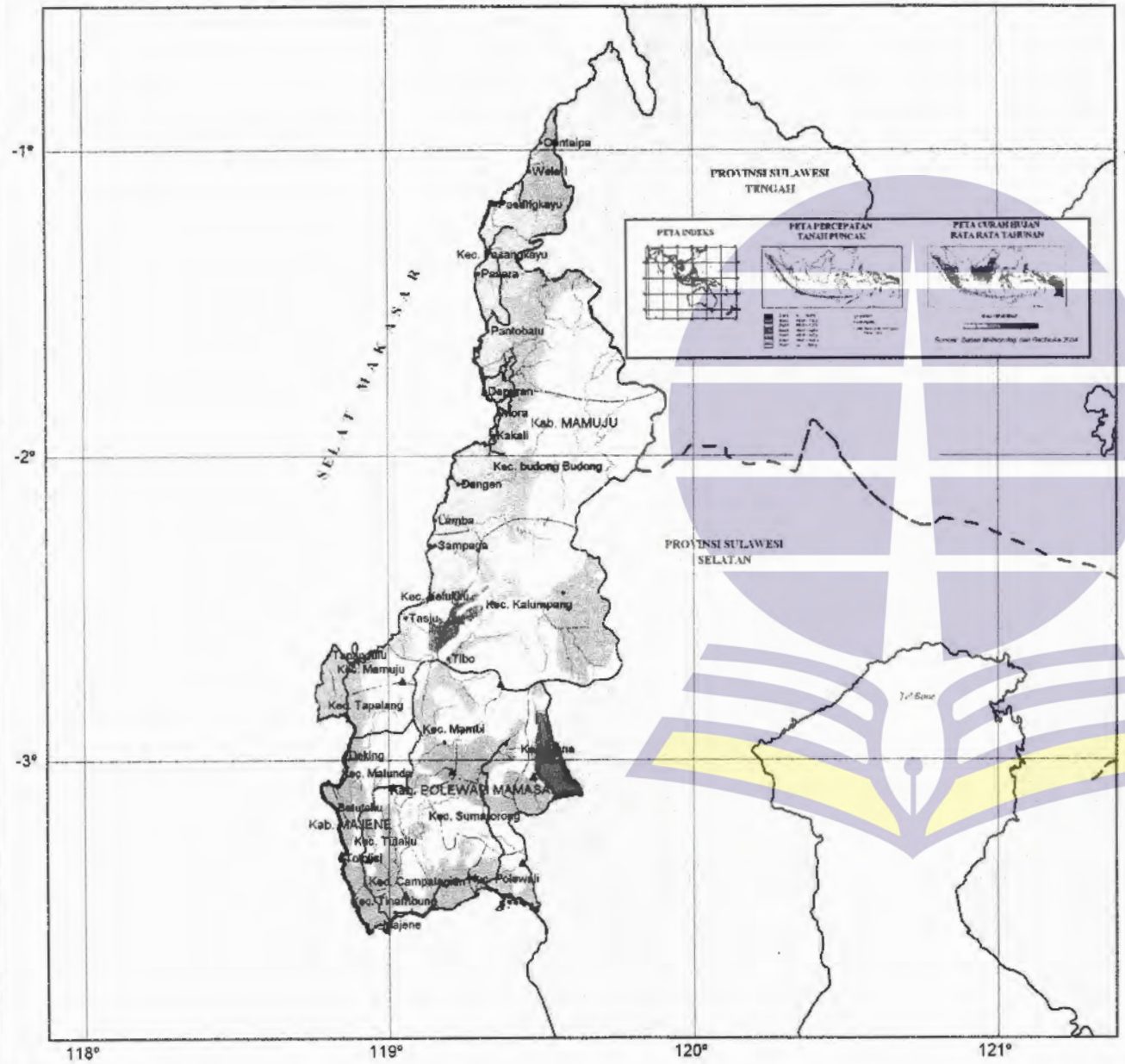

U

2009

0 50 100 Km

KETERANGAN

Zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah
Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan sangat rendah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, baik gerakan tanah lama maupun gerakan tanah baru, kecuali pada daerah tidak luas pada tebing sungai.

Zona kerentanan gerakan tanah rendah
Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan rendah untuk terkena gerakan tanah. Umumnya pada zona ini jarang terjadi gerakan tanah jika tidak mengalami gangguan pada lereng, dan jika terdapat gerakan tanah lama, lereng telah mantap kembali. Gerakan tanah berdimensi kecil mungkin dapat terjadi, terutama pada tebing lembah (alur) sungai.

Zona kerentanan gerakan tanah menengah
Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan menengah untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi dan erosi kuat.

Zona kerentanan gerakan tanah tinggi
Daerah yang mempunyai tingkat kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah. Pada zona ini sering terjadi gerakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat.

BATASAN DAN FUNGSI PETA

Zona kerentanan gerakan tanah yang termuat dalam peta ini bersifat umum untuk informasi awal tentang daerah-daerah yang mempunyai kemungkinan terjadinya gerakan tanah dan daerah-daerah yang relatif mantap.Perubahan kondisi tofografi dan tata guna lahan setelah dipetakan dapat merubah zona kerentanan gerakan tanah yang termuat dalam peta.

SARAN UNTUK PEMAKAI PETA

Peta ini memuat informasi tingkat kerentanan (kepekaan) suatu daerah untuk terjadi gerakan tanah sehingga dapat diindentifikasi daerah-daerah yang akan menghadapi permasalahan gerakan tanah, dan melakukan upaya pencegahan atau penanggulangannya.
Daerah yang terletak pada zona kerentanan gerakan tanah tinggi untuk terkena gerakan tanah, agar dihindarkan sebagai lokasi pemukiman atau bangunan infrastruktur vital dan strategis.
Jika tidak dapat dihindari, akan mengembangkan atau membangun pada daerah berkerentanan gerakan tanah menengah, diperlukan penyelidikan kemantapan lereng secara rinci untuk menghindari terjadi gerkantanah.
Pada zona berkerentanan gerakan tanah menengah harus dilakukan penyelidikan gerakantanah secara rinci jika akan melakukan penyayatan lereng.

KETERANGAN

DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
BADAN GEOLOGI
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

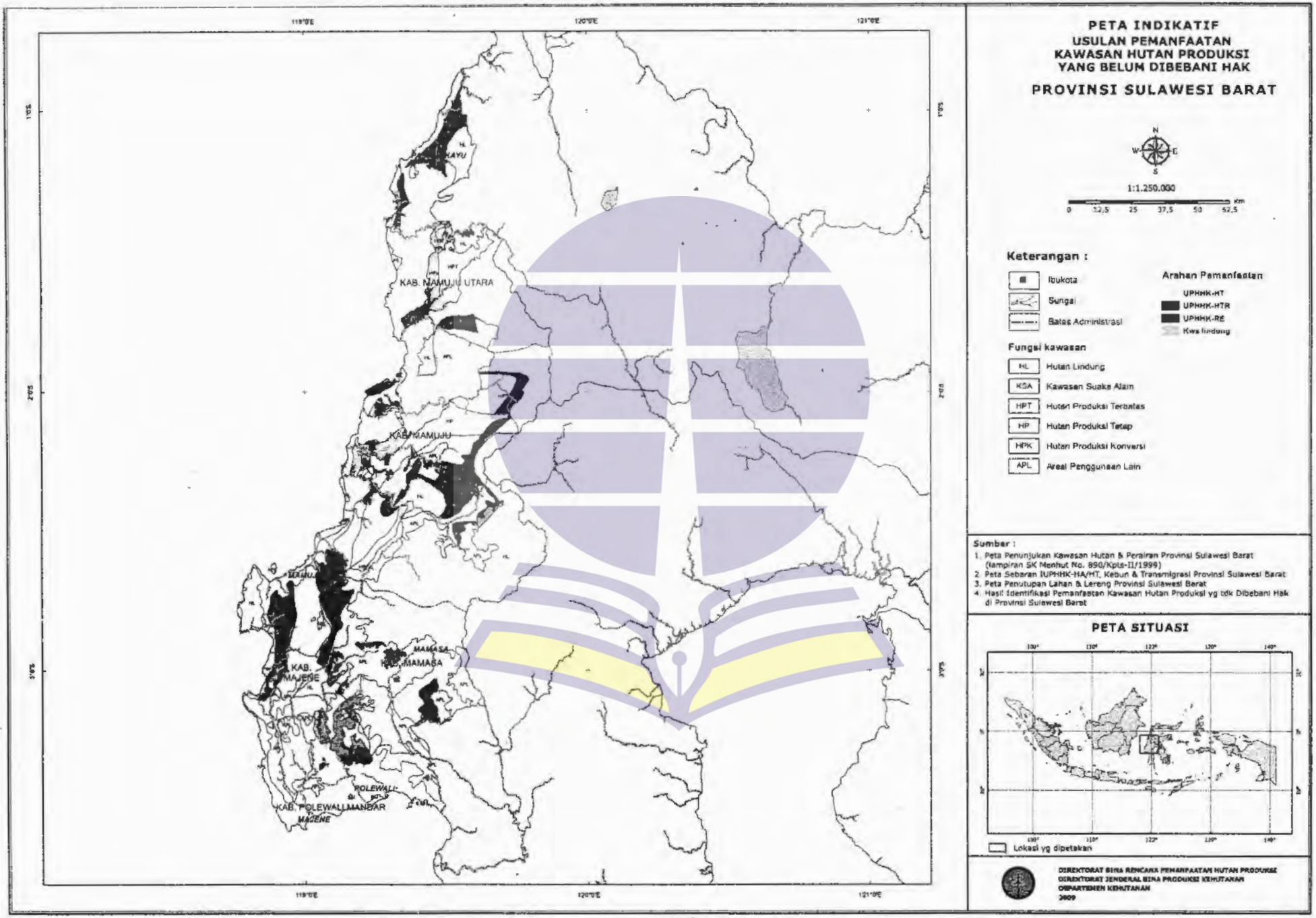

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

43576.pdf

Proyeksi Penduduk Sulawesi Barat 2010-2035 Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010

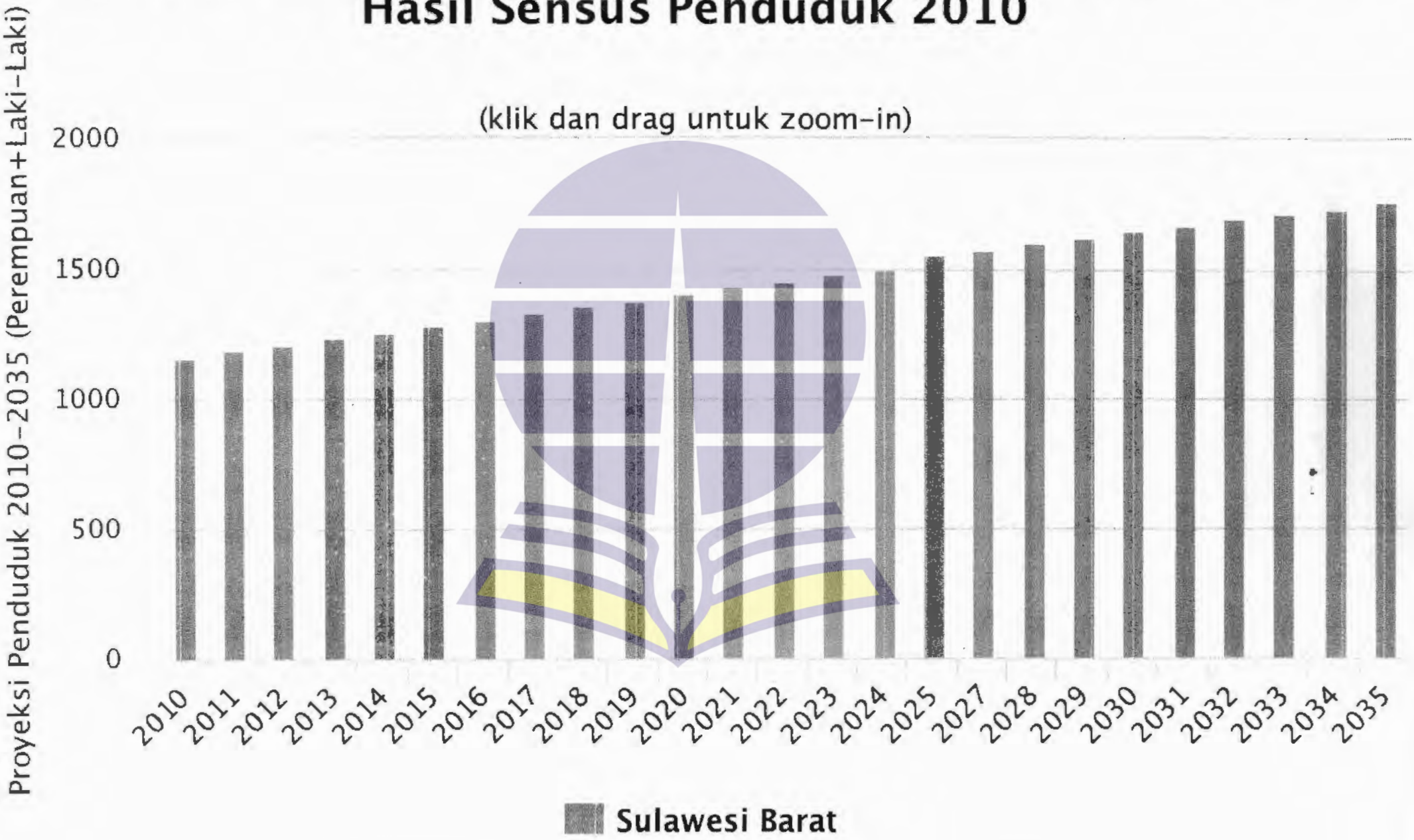

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka